

332.1

DAR

a c 2

ANALISIS REKAPITALISASI SEBAGAI PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

(STUDI KASUS BANK BPD JAWA TENGAH)

TESIS

*Diajukan kepada Pengelola Program Studi Magister Manajemen
Universitas Diponegoro
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana - S2 Magister Manajemen*



Diajukan oleh :

Nama : Robertus Darryanto
NIM : C4A097030

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2000**

HALAMAN PENGESAHAN

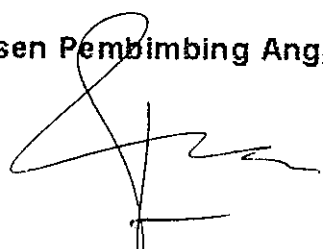
Nama Penyusun : Robertus Darryanto
Nomer Induk Mahasiswa : C4A097030
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Tesis : Analisis Rekapitalisasi Sebagai
Program Penyehatan Perbankan di
Indonesia (Studi Kasus Bank BPD
Jawa Tengah)

Semarang, 3 Oktober 2000

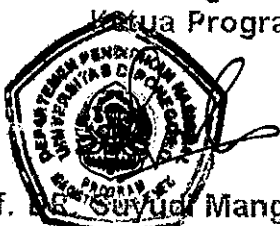
Dosen Pembimbing Utama :

Dosen Pembimbing Anggota:


Drs. Suhada Sofyan, MSIE


Drs. Prasetyono, MSI

Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Ketua Program


Prof. Dr. Suyud Mangunwihardjo

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan tesis ini.

Tesis ini bermula dari dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang membawa industri perbankan nasional mengalami kesulitan beroperasi.

Melihat kenyataan tersebut, mendorong otoritas moneter mengambil langkah-langkah perbaikan guna melindungi kepentingan masyarakat dengan melakukan rekapitalisasi yang diharapkan akan mampu berperan untuk menyehatkan kembali perbankan nasional.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi yang didapat dari rekapitalisasi dalam menyehatkan Bank BPD Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing, istri, anak dan adik kami yang telah memberi dukungan dan bantuan moral dalam melaksanakan penelitian ini.

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstrack	xii
Abstrak	xiii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Telaah Pustaka dan Penelitian Terdahulu	9
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	15
1.6 Definisi Operasional	20
1.7 Metodologi Penelitian.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
2.1 Pengertian Bank	29
2.2 Karakteristik Usaha Perbankan.....	30
2.3 Sistem Perbankan.....	32
2.4 Lingkungan Perbankan	34
2.5 Tujuan, Sasaran, dan Kendala Operasional Bank.....	36
2.6 Konsep Pengukuran Pendapatan Bank.....	41

2.7 Kualitas Aktiva Produktif.....	43
2.8 Likuiditas Bank.....	51
2.9 Permodalan Bank.....	56
2.10 Restrukturisasi dan Rekapitalisasi Perbankan.....	76
2.11 Penilaian Kesehatan Bank Umum	80
BAB III DESKRIPSI UMUM BANK BPD JAWA TENGAH.....	94
3.1 Deskripsi Berdirinya Bank BPD Jawa Tengah.....	94
3.2 Misi dan Visi Bank BPD Jawa Tengah.....	95
3.3 Permodalan.....	97
3.4 Profil Sumber Daya Manusia.....	98
3.5 Sarana dan Prasarana.....	99
3.6 Produk dan Jasa Pelayanan Bank	99
3.7 Teknik, Strategi, Sistem, dan Prosedur	101
3.8 Struktur Organisasi Bank BPD Jawa Tengah.....	102
3.9 Tinjauan Umum Profil Aktiva-Pasiva Bank BPD Jawa Tengah.....	104
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	112
4.1 Analisis Pertumbuhan Modal Internal Bank, Rekapitalisasi dan kesehatan Modal.	114
4.2 Analisis faktor Kualitas Aktiva Produktif.....	122
4.3 Analisis Faktor Kemampuan (Earning Power).....	127
4.4 Analisis Faktor Likuiditas Bank BPD Jawa Tengah.....	131

4.5 Analisis Faktor BMPK dan Faktor Judgement.....	137
4.6 Analisis Menyeluruh Tingkat Kesehatan Bank BPD Jawa Tengah Pra dan Pasca Rekapitalisasi Perbankan.....	142
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL.....	148
5.1 Kesimpulan.....	148
5.2 Implikasi Manajerial	151

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kontribusi Aktiva Bank Terhadap Likuiditas dan Rentabilitas Bank.....	52
Tabel 2. Ilustrasi Kebutuhan Modal Bank.....	61
Tabel 3. Predikat Penilaian Faktor Permodalan	84
Tabel 4. Predikat Penilaian Komponen rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif.....	85
Tabel 5. Predikat Komponen Rasio PPAPD Terhadap PPAPWD.....	86
Tabel 6. Predikat Penilaian Faktor Kualitas Aktiva Produktif	86
Tabel 7. Predikat Penilaian Komponen Manajemen Umum.....	87
Tabel 8. Predikat Penilaian Komponen Manajemen Risiko.....	88
Tabel 9. Predikat Penilaian Faktor Manajemen.....	88
Tabel 10. Predikat penilaian Komponen Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume usaha.....	89
Tabel 11. Predikat Untuk Komponen Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional.....	89
Tabel 12. Predikat Penilaian Faktor Rentabilitas (Earning Power).....	89
Tabel 13. Predikat Penilaian Komponen rasio Kewajiban Bersih Call Money Terhadap Aktiva lancar.....	91
Tabel 14. Predikat Penilaian Komponen Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap dana Yang Diterima.....	92

UPT-POSTAL-BKOP

Tabel 15. Predikat Penilaian Faktor Likuiditas Bank.....	92
Tabel 16. Predikat Penilaian Kesehatan Bank Umum.....	93
Tabel 17 .Profile SDM Dilihat Dari Tingkat Pendidikan.....	99
Tabel 18. Neraca Bank BPD Jawa Tengah Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999.....	106
Tabel 19. Laporan Rugi-Laba Bank BPD Jawa Tengah Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999.....	107
Tabel 20. Laporan Komitmen Dan Kontinjensi Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999.....	111
Tabel 21. Data Dan Perhitungan Pertumbuhan Modal Intern Tahun 1997, 1998 ,Dan 1999.....	115
Tabel 22. Pertubuhan Modal Intern Dalam Rupiah.....	117
Tabel 23. Dana Rekapitalisasi dan Struktur Modal Pasca Rekapitalisasi.....	119
Tabel 24 Tingkat Capital Adiquacy Ratio BPD Jateng Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999.....	119
Tabel 25 . Penilaian Kesehatan Modal bank.....	121
Tabel 26. Porsi dan Perkembangan Aktiva Produktif.....	122
Tabel 27. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk Dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk.....	125
Tabel 28. Perhitungan Rasio Untuk Kualitas Aktiva Produktif.....	125
Tabel 29. Penilaian Kesehatan Faktor Kualitas Aktiva Produktif.....	126

Tabel 30. Penilaian Faktor Manajemen Bank BPD Jawa Tengah.....	130
Tabel 31. Komposisi Pendapatan Bank Dan Perkembangannya.....	131
Tabel 32. Pendapatan Bunga Neto.....	132
Tabel 33. Komposisi Biaya Bank BPD Jateng Tahun 1997, 1998 dan 1999.....	134
Tabel 34. Rangkuman Data laba Bersih, Aktiva Rata-Rata, Pendapatan Operasional Dan Biaya Operasional.....	134
Tabel 35. Perhitungan Aktiva Rata-Rata.....	134
Tabel 36. Perhitungan Rentabilitas Bank BPD Jawa Tengah Tahun 1997, 1998 & 1999.....	135
Tabel 37. Penilaian Kesehatan Faktor Rentabilitas.....	136
Tabel 38. Kewajiban Bersih Call Money Dan Aktiva Lancar.....	138
Tabel 39. Jumlah kredit yang diberikan dan dana yang diterima.....	138
Tabel 40. Perhitungan Modal Inti.....	139
Tabel 41. Kekurangan Jumlah PPAPD dari PPAPWD.....	139
Tabel 42. Perhitungan Indikator Likuiditas bank 1997-1999.....	139
Tabel 43. Penilaian Kesehatan Faktor Likuiditas.....	141
Tabel 44. Daftar Pelanggaran BMPK Tahun 1997.....	142
Tabel 45. Daftar Pelanggaran BMPK Tahun 1998.....	143
Tabel 46. Daftar Pelanggaran BMPK Tahun 1999.....	143
Tabel 47. Daftar Penilaian Faktor Judgement.....	144
Tabel 48. Hasil Penilaian Kesehatan Bank BPD Jawa Tengah 1997, 1998 & 1999.....	145

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	19
Gambar 2. Produk Berbasis Bunga dan Sasaran Bank.....	38
Gambar 3. Hubungan Antara Rasio Pendapatan.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Laporan Keuangan Bank Bpd Jawa Tengah Tahun 1997, 1998 Dan 1999 Berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen & Kontijensi, Laporan Laba Ditahan.....	153
Lampiran 2	Struktur Organisasi Bank BPD Jawa Tengah.....	156
Lampiran 3	Jaringan Operasional Bank BPD Jawa Tengah.....	157
Lampiran 4	Ringkasan Formulir Bobot Konversi Dan Bobot Resiko Untuk Menentukan Car Bank Umum.....	158
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan / Pernyataan Dan Nilai Kondisinya.....	163

UPT-PUSTAKA-UNAM

ABSTRACT

The economic crisis knocking down Indonesia up to nowadays have made banking industry get worse. The Authority initiative in handling it by giving Indonesian Bank Liquidity Aids followed with Tight Money Policy at the very same time, however, have made the matter be complicated for appearing double impact those are negative spread at one hand and non performing loan at the other one.

Facing the unfortune situation, Bank Indonesia formed a special institution which one of the mission is to recover banking industry by recapitalizing. To which undergone recapitalization, banking had to have due diligence first, before grouped onto three categories, namely:

1. Category A, Bank with the Capital Adequacy Ratio more than 4%
2. Category B, Bank with the Capital Adequacy Ratio -25% up to 4%
3. Category C, Bank with the Capital Adequacy Ratio less than -25%

Those which were being in B Category were given chance to add their capital first before being the same as those in B category, and should have to redeposit their capital up to 20%

Covering capital gap and enhance the capital recovery is the aim of this program. Any way, adequate capital will support the managing assets quality, earning power and full fill the liquidity if it be managed professionally. That's why, it viewed CAMEL Factor in analyzing recapitalization at Bank BPD Jawa Tengah.

It concluded from the result that recapitalization was able to cover the capital gap while giving significant contribution for Bank BPD Jawa Tengah

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga saat ini telah mengakibatkan industri perbankan terpuruk. Upaya otoritas untuk mengatasinya dengan memberi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta kebijakan uang ketat justru menjadi bumerang karena menimbulkan efek ganda yaitu *Negatif Spread* dan *Non Performing Loan*.

Menyikapi hal itu Bank Indonesia membentuk badan khusus yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan bank melalui rekapitalisasi. Dalam mengikuti rekapitalisasi bank-bank lebih dahulu melakukan due diligence dan dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu

1. Kategori A, yaitu bank yang memiliki CAR 4% atau lebih
2. Kategori B, yaitu bank yang memiliki CAR dibawah 4% sampai-25%
3. Kategori C, yaitu bank yang memiliki CAR di bawah - 25%

Bank yang mengikuti program rekapitalisasi adalah bank Kategori B. Bank berkategori C diberi kesempatan menambah modalnya hingga masuk kategori B dan harus menyertor kembali modal sebesar 20%.

Program rekapitalisasi diharapkan mampu menutup *Capital Gap* dan meningkatkan kesehatan modal. Modal yang cukup akan mendukung pengelolaan kualitas aset kemampuan-labaan dan memenuhi likuiditas bila dikelola secara profesional. Oleh karena itu dalam thesis ini dilakukan terhadap faktor CAMEL di Bank BPD Jawa Tengah.

Dari hasil analisa disimpulkan bahwa rekapitalisasi mampu menutup Capital Gap dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesehatan Bank BPD Jawa Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 hingga saat ini telah mengakibatkan Industri perbankan Indonesia menghadapi berbagai kesulitan besar. Hal ini disebabkan oleh banyak bank yang melakukan pinjaman luar negeri tanpa melakukan "hedging", pemberian kredit kepada kelompoknya yang jauh melampaui BMPK, struktur permodalan yang lemah dan sebagainya. Kondisi ini kemudian mendapatkan respon dari BI yaitu dengan memberikan Bantuan likuiditas Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi perbankan yang hingga bulan Agustus 1998 sudah mencapai Rp 141 trilyun, dan diikuti kebijakan uang ketat (tight money Policy) dengan mematok suku bunga yang tinggi dengan tujuan untuk menekan spekulasi terhadap dollar, namun kebijakan ini menjadi bumerang bagi perbankan dengan efek ganda yaitu *negative spread* dan *Non Performing Loan (NPL)* hingga mencapai Rp 400 triliun atau 40% dari portfolio perbankan.

Kondisi krisis juga menimbulkan kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang relatif besar sehingga memaksa perbankan untuk menyisihkan cadangan penghapusan kredit yang besar pula.

Cadangan penghapusan kredit yang besar menunjukkan terjadi potensi kerugian yang makin besar pula. Potensi kerugian ini masih diterpa oleh kebijakan uang ketat yang sangat erat berkaitan dengan *negative spread*. Pada saat kebijakan uang ketat biaya dana bank sangat tinggi bahkan lebih tinggi daripada suku bunga kredit, oleh karena itu kerugian yang beruntun terjadi yaitu terjadinya *negative spread*. Dalam pada itu, disisi kredit kualitasnya terus memburuk sehingga meskipun bank memberlakukan suku bunga kredit hingga 35,72%, perolehan efektifnya akan jauh dibawah angka tersebut. Dengan kata lain bahwa selain secara *de jure* bank sudah menanggung kerugian, secara *de facto* tingkat kerugian jauh lebih besar sebab bunga yang dibayarkan debitur lebih rendah daripada *counter rate*.

Sejalan dengan kondisi tersebut maka Bank Indonesia (BI) diberi kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat prefentif maupun represif.

Di lain pihak bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan masyarakat atas dasar kepercayaan.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan, Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan maka bank telah dianggap memenuhi ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Bila keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, berdasarkan penilaian Bank Indonesia (kondisi usaha bank mungkin semakin memburuk) antara lain yang ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, maka ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank tersebut agar tidak terjadi pencabutan ijin usahanya dan atau tindakan likuidasi.

Mengingat hal tersebut diatas, maka dibentuklah badan khusus yang dalam hal ini pemerintah memerlukan konsultasi dengan komisi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang

membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan. Badan khusus tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan yang bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu :

1. Penyehatan bank yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia.
2. Penyelesaian pengembalian baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (Assets Management Unit).
3. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan. Selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

Perbankan di Indonesia sebagian besar mengalami *Under Capitalized* sehingga modal bank harus ditingkatkan supaya sesuai dengan ketentuan otoritas moneter. Bila pemilik saham pengendali secara suka rela tidak mampu menambah modal yang disyaratkan maka mendatangkan pemodal baru. Untuk melakukan rekapitalisasi sebelumnya

bank-bank telah melakukan *due diligence* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Internasional. Dalam *due diligence* tersebut selanjutnya bank-bank dikelompokkan dalam kategori A, B, dan C. Kategori A adalah untuk bank yang memiliki Capital Adiquacy ratio (CAR) di atas 4%, kategori B adalah bank yang memiliki CAR sebesar -25% sampai 4% dan untuk kategori C adalah bagi bank yang memiliki CAR lebih kecil dari -25%.

Jangankan dengan CAR minus, seandainya rata-rata perbankan nasional mampu meraih CAR minimum 4% pun masih tertinggal, karena dalam menerapkan ketentuan CAR perbankan Indonesia sudah tertinggal dibandingkan dengan negara lain sesama anggota *Bank of International Settlement* (BIS). Mereka sudah mencanangkan CAR sebesar 8% sesuai dengan ketentuan BIS pada tahun 1998 dan berlaku efektif sejak 1992.

Secara prinsip sebenarnya bank yang akan mengikuti program rekapitalisasi adalah bank dengan kategori B, namun bukan berarti bank kategori A terbebaskan dari tanggung jawab. Untuk bank kategori A walaupun tidak mengikuti rekapitalisasi diwajibkan untuk membuat rencana bisnis yang jelas dan diserahkan ke BI paling lambat 30 hari sejak selesainya *due diligence*. Begitu juga bagi bank dengan kategori C masih diberi kesempatan untuk menambah modalnya hingga mencapai CAR yang masuk kategori B hingga batas waktu ynag telah ditentukan. Bila

bank telah masuk kategori B bukan berarti secara otomatis mengikuti program rekapitalisasi, namun masih harus menyeter kembali modal sebesar 20% dari seluruh tambahan modal yang seharusnya (80% ditanggung pemerintah).

Mengenai angka CAR untuk Bank BPD ada perbedaan dengan bank umum swasta nasional, dimana CAR untuk bank Umum swasta yang sedang dalam rekapitalisasi sulit untuk bisa melebihi 4%, sedangkan untuk Bank BPD bisa memenuhi hingga CAR 8% bahkan lebih.

Penerapan CAR BPD sampai dengan 8% tersebut ada dua pertimbangan yaitu pertama bahwa hampir semua Bank BPD berskala kecil, kedua bahwa kebutuhan rekapitalisasi BPD tidak terlalu banyak. Namun demikian masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan setelah perjanjian rekapitalisasi ini yaitu bagi BPD yang masih berstatus Perusda agar secepatnya merubah statusnya menjadi PT dan melakukan *up dating* bagi asset yang akan ditransfer ke Asset Management Unit (AMU). Selain itu harus menyelesaikan program restrukturisasi ke BI dalam waktu satu bulan dan harus menyusun *performance plan* yang disyahkan pada bulan Februari 1999.

1.2. Perumusan Masalah

Pendapatan bank di Indonesia umumnya didominasi oleh pendapatan bunga sebagai akibat dominasi penempatan dana pada aktiva produktif berupa kredit. Semakin besar portofolio aktiva produktif yang ditempatkan maka semakin besar pendapatan bunga yang dapat diharapkan. Namun demikian aktiva produktif merupakan aktiva yang sangat besar risikonya, artinya semakin besar dominasi aktiva produktif juga semakin besar risiko yang kemungkinan ditanggung bank, atau sebaliknya. Risiko ini tak mungkin dihilangkan, paling hanya bisa ditekan pada tingkat tertentu. Untuk itu bank harus bertanggung jawab dalam memelihara kualitas aktiva produktifnya dan sekaligus mampu menjaga likuiditasnya.

Untuk menampung kemungkinan risiko pada aktiva produktifnya ataupun risiko likuiditas, sebuah bank perlu memiliki kecukupan modal untuk membiayai operasinya. Sebab risiko yang terjadi bukan tanggung jawab nasabah, melainkan merupakan beban bagi bank yang bersangkutan. Kecukupan modal menjadi komitmen setiap bank, sebab modal yang terlalu besar akan merugikan atau menurunkan tingkat keuntungan, sementara bila modal terlalu kecil disamping tidak mampu menutup risiko juga akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan

masyarakat. Jadi kecukupan modal tidak hanya dipandang sebagai dana yang siap dioperasikan, namun juga berkaitan dengan kepentingan *Return-Risk Tradeoff*. Ilustrasi yang sangat mencengangkan adalah ketika bank-bank di Indonesia memiliki CAR yang negatif. Kondisi ini jelas sangat tidak mampu menutup risiko dan ujungnya jelas hilangnya kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya adalah kebangkrutan atau likuidasi bank. Tak terkecuali BPD Jawa Tengah yang memiliki CAR -28,5%%. Sungguh sangat tidak aman bagi masyarakat untuk menyimpan dana di BPD Jawa Tengah. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat kalau BPD tetap dipertahankan tanpa adanya penambahan modal. Untuk itu melalui kebijakan pemerintah BPD Jawa tengah harus mengikuti rekapitalisasi agar kondisi permodalan sehat.

Kondisi modal yang sehat bukan berarti secara pasti kondisi likuiditas, rentabilitas, kualitas aktiva dan manajemen juga sehat. Modal yang sehat hanya memberikan kontribusi bagi kesehatan bank. Kesehatan permodalan harus dibedakan dengan kesehatan bank. Artinya program rekapitalisasi tidak berarti serta merta akan menyehatkan BPD Jawa Tengah/perbankan kita. Program Rekapitalisasi yang dilakukan BPD Jawa Tengah hanyalah merupakan langkah awal penyediaan dana yang siap dioperasikan dalam kondisi modal yang sehat sehingga diharapkan mampu juga meningkatkan kesehatan pada faktor yang lain bagi BPD

Jawa tengah. Untuk itu berkaitan dengan kebutuhan penambahan modal BPD Jawa Tengah sebesar Rp 486 milyar dalam program rekapitalisasi perlu dikaji, perlu diteliti apakah program tersebut akan mampu menutup capital Gap pada bank BPD Jateng dan kontribusi rekapitalisasi bagi penyehatan Bank BPD Jawa Tengah.

1.3. Telaah Pustaka dan Penelitian Terdahulu

1.3.1. Telaah Pustaka

Perkembangan perbankan nasional akhir-akhir ini memerlukan penyesuaian pada aspek permodalan bank agar dapat terus hidup dan berkembang sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan Capital Adequacy ratio (CAR) atau modal minimum sebesar 4%.

Capital Adequacy ratio (CAR) adalah merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Teknik perhitungan CAR di Indonesia mengadopsi Ketentuan Bank Of International Settlement (BIS). Menurut BIS bahwa modal minimum bank (CAR) yang sehat adalah 8%, namun di Indonesia mempunyai besaran 4% terutama untuk tahun 1998. Besaran 4%

tersebut didasarkan pada kemampuan perbankan nasional setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berat untuk memenuhi CAR 8%.

Ketentuan CAR atau sering disebut sebagai rasio kecukupan modal merupakan rasio kecukupan modal yang harus dipenuhi demi kepentingan otoritas moneter. Artinya bahwa ketentuan tersebut semata-mata bertujuan untuk melindungi nasabah. Otoritas moneter tidak menghendaki bank yang beroperasi dengan modal *dengkul* yang hanya mengandalkan dana pihak ketiga / masyarakat. Untuk itu rasio tersebut belum tentu sesuai dengan kemauan manajemen bank yang umumnya beroperasi dengan prinsip ekonomi. Bank akan mempertimbangkan kepentingan Risk & Return. Bank mempunyai kecenderungan dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh pendapatan yang optimal bahkan maksimal. Bila tidak ada ketentuan minimum dipastikan banyak bank yang beroperasi dengan hanya mengandalkan dana masyarakat sehingga ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Untuk itu bank yang menurut hasil pemeriksaan pemerintah dapat dipertahankan harus direkapitalisasi. Rekapitalisasi (herkapitalisasi) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi. Kedua hal sering diartikan sama, padahal restrukturisasi lebih bersifat kualitatif yaitu berupa penyusunan kembali mengenai perimbangan modal,

sementara rekapitalisasi lebih bersifat kuantitatif yaitu berupa penyusunan kembali berupa jumlah lembar saham / sekuritas atau jumlah modal yang dilakukan secara sukarela dengan perhatian pemegang saham untuk masing-masing jenis sekuritas tanpa memandang wilayah pengadilan seperti reorganisasi (Bambang Riyanto, hal 233). Dengan kata lain rekapitalisasi merupakan penyusunan kembali struktur modal khususnya dan struktur finansial pada umumnya (Wasis, hal 207). Tapi secara umum sebenarnya rekapitalisasi merupakan proses penyuntikan modal baru kedalam suatu unit usaha, termasuk usaha perbankan (Kompas, 16 Agustus 1999).

Suatu bank melakukan rekapitalisasi umumnya bertujuan untuk menyesuaikan struktur modalnya dengan perkembangan perusahaannya agar dapat kembali dalam keadaan *property Capitalized*, kemudian untuk menyederhanakan struktur modalnya atau untuk mempercepat proses merger suatu bank. Sedangkan rekapitalisasi perbankan di Indonesia adalah untuk menyesuaikan perkembangan struktur modalnya (karena sebagian bank berada pada *Under Capitalized*) agar dapat menyesuaikan perkembangan perusahaannya dan dapat beroperasi secara sehat sehingga kepentingan publik terjaga.

Untuk itu kepentingan rekapitalisasi harus dipandang dari sisi kepentingan publik dan kepentingan manajemen bank (Internal management). Program rekapitalisasi yang diatur oleh otoritas moneter (Bank Indonesia) dengan segala ketentuannya disamping untuk menyehatkan permodalan bank juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat (risk).

Kemudian perlu diingat bahwa penyuntikan modal / rekapitalisasi hanyalah merupakan usaha penyehatan permodalan, sedangkan faktor rentabilitas, likuiditas, kualitas aktiva dan manajemen belum tentu secara otomatis menjadi sehat atau bank menjadi sehat. Untuk itu setiap program rekapitalisasi hendaknya dipahami sebagai langkah awal untuk menuju penyehatan perbankan, walaupun program itu belum tentu memenuhi sasaran.

1.3.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Zakaria (1997) melakukan penelitian tentang tingkat efisiensi bank sebelum dan sesudah berlakunya ketentuan modal minimum bank pada bank besar dan bank kecil, bank devisa dan bank non devisa. Tingkat efisiensi yang digunakan adalah indeks efisiensi untuk dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah berlakunya ketentuan

modal minimum bank sehingga meliputi tahun 1992 sampai dengan 1995.

Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh bank yang bersangkutan melalui media cetak, surat kabar, majalah maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan yang signifikan untuk seluruh nisbah keuangan yang digunakan.
2. Dilihat dari nisbah rentabilitas ternyata tidak terjadi perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya ketentuan penyediaan modal minimum.
3. Dilihat dari nisbah solvabilitas sebelum dan sesudah berlakunya ketentuan modal minimum bank maka terjadi perbedaan yang signifikan untuk solvabilitas.
4. Dilihat dari nisbah likuiditas, maka terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya ketentuan penyediaan modal minimum.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bank swasta yang beroperasi di Indonesia antara tahun 1991, 1992, 1994 dan 1995 ternyata telah terjadi perbedaan efisiensi industri

perbankan yang signifikan antara sebelum dan sesudah berlakunya ketentuan penyediaan modal minimum pada tahun 1993. Berpijak pada penelitian ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa penyehatan permodalan akan membawa perubahan pada rentabilitas, solvabilitas maupun likuiditas. Untuk itu dengan adanya program rekapitalisasi akan memberikan indikasi perubahan pada efisinesi, likuiditas, kualitas aktiva suatu bank yang menjadi komponen dalam penilaian kesehatan bank. Sejahumana perubahan itu terjadi tentu akan menjadi kajian yang menarik disamping penting bagi manajemen dalam menyikapi capital gap yang sedang terjadi pada dunia perbankan kita, termasuk BPD Jawa Tengah.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1.4.1.1. Untuk menganalisis rekapitalisasi dalam kaitannya dengan capital Gap pada BPD Jawa Tengah.

1.4.1.2. Untuk menganalisis rekapitalisasi (penyehatan Permodalan) dalam kaitannya dengan Tingkat Kesehatan Bank BPD Jawa Tengah.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan Manajemen BPD Jawa Tengah berkaitan dengan Kondisi Capital Gap yang terjadi saat ini di BPD Jawa Tengah.

1.4.2.2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan informasi yang berarti bagi manajemen BPD Jateng dalam hal menyikapi rekapitalisasi demikesehatan BPD Jawa Tengah.

1.4.2.3. Penelitian ini dapat digunakan bagi para peneliti lebih lanjut yang relevan dengan permasalahan

1.5 . Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebuah bank yang mampu melakukan fungsinya adalah bank yang memiliki modal yang cukup. Modal yang cukup akan mampu menggerakkan operasi bank. Untuk memenuhi modal yang cukup dapat dipenuhi dari pertumbuhan modal intern, penyetoran modal dari pemilik lama atau mendatangkan modal dari pemilik/calon pemilik baru. Alternatif-alternatif tersebut merupakan prioritas bank.

Dalam pandangan manajemen bank, bahwa modal minimum adalah modal yang bisa menutup capital gap. Artinya peningkatan modal

digambarkan dari peningkatan assetsnya. Semakin kecil pertumbuhan modal intern, umumnya semakin besar capital gapnya.

Dalam pandangan otoritas moneter, suatu bank yang beroperasi harus memenuhi ketentuan modal minimum atau rasio kecukupan modal. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap usaha menginginkan dengan modal sekecil-kecilnya untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Agar bank tidak beroperasi dengan modal yang sekecil-kecilnya maka dibatasi dengan tingkat rasio kecukupan modal yang disebut dengan Capital Adequacy ratio (CAR).

Pada masa krisis, kondisi perbankan di Indonesia sebagian besar memiliki CAR negatif termasuk Bank BPD Jawa Tengah. Untuk itu Pemerintah melakukan Program Rekapitalisasi untuk menyehatkan modal bank di Indonesia. Untuk dapat mengikuti program ini, bank-bank harus melalui uji tuntas atau Due Diligence. *Due diligence* tersebut dilakukan oleh kantor Akuntan Publik Internasional. Dengan hasil pemeriksaan tersebut maka dapat dibagi dalam tiga kategori bank ditinjau dari rasio kecukupan modal yaitu:

1. Kategori A yaitu bank umum yang memiliki Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPPM) sama dengan atau lebih dari 4%.
2. Kategori B yaitu bank umum dengan KPPM lebih kecil dari 4% sampai -25%.

3. Kategori C adalah bank umum yang memiliki KPPM sama dengan atau lebih kecil dari -25%

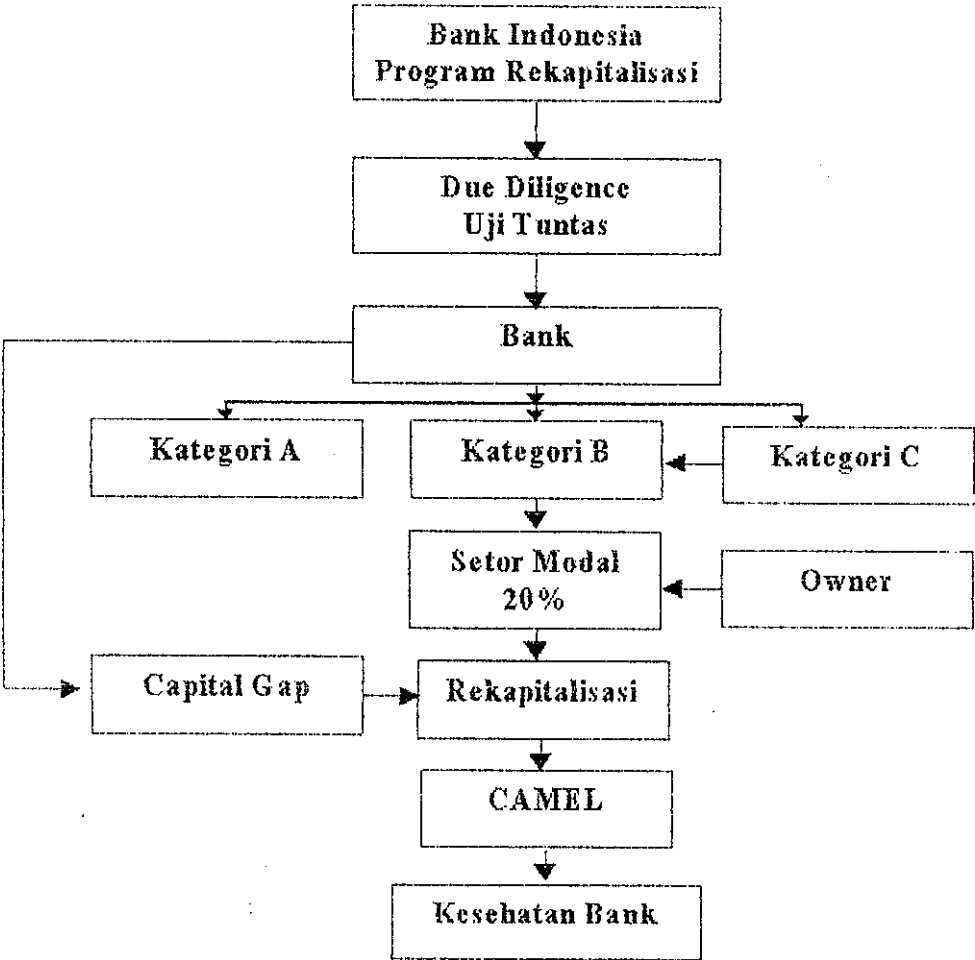
Bank-bank yang berhak mengikuti program rekapitalisasi adalah bank dengan kategori B. Untuk bank dengan kategori A tidak mengikuti rekapitalisasi namun wajib membuat *business plan* yang jelas. Bagi bank dengan kategori C bila menginginkan program rekapitalisasi maka harus menambah modal terlebih dahulu hingga mencapai CAR antara -25% hingga 4% atau masuk kelompok B hingga batas waktu yang ditentukan. Setelah bank masuk dalam kategori B selanjutnya harus mampu menambah modalnya 20% dari kebutuhan dana rekapitalisasi pada saat program rekapitalisasi dilakukan.

Fokus kajian thesis ini adalah rekapitalisasi dalam kaitannya dengan capital gap dan kesehatan Bank. Perlu dibedakan pengertian restrukturisasi dan rekapitalisasi. Restrukturisasi Finansial adalah lebih bersifat kualitatif yaitu berupa penyusunan kembali mengenai perimbangan modal, sedangkan perhatian rekapitalisasi adalah pada aspek kuantitatif yaitu menyangkut penyusunan kembali mengenai jumlah modal atau lembar saham/sekuritas. Jadi jika dalam struktur finansialnya terdapat (sebagai contoh) misalnya modal saham 20%, surplus 30%, hutang obligasi 25% dan hutang dagang 25%, maka rekapitalisasi merubah struktur tersebut menjadi misalnya modal saham 40%, surplus 30%,

hutang obligasi 20% dan hutang dagang 10%. Perubahan persentase komponen modal tersebut adalah tergantung dari maksudnya, yaitu bisa untuk memperbesar modal sendiri, menaikkan solvabilitas atau mungkin untuk menaikkan likuiditas dan sebagainya.

Program rekapitalisasi harus dilihat dari kepentingan otoritas moneter dan kepentingan manajemen bank. Ada dua kepentingan yaitu pertama kepentingan Otoritas Moneter yang ingin melindungi nasabah atau tujuan yang lebih luas yaitu menggerakkan sektor riil melalui penyehatan permodalan bank (ingat ketentuan CAR), kedua adalah kepentingan manajemen dalam menyikapi penyuntikan modal yang lebih bersifat pertimbangan bisnis. Seperti yang terjadi pada Bank BPD Jawa Tengah yang sedang mengikuti program rekapitalisasi sebab CAR-nya mencapai -28,5%. Apakah rekapitalisasi yang dilakukan akan mampu menutup capital gap dan meningkatkan kesehatan modal. Sebagai penggerak operasi, modal yang cukup (Faktor Capital) pada akhirnya akan mampu mendukung pengelolaan kualitas assest (Faktor Assets Quality), kemampulabaan (Earning Power) dan memenuhi likuiditas (Liquidity) bila dikelola secara profesional (Management). Dengan kata lain perbaikan pada variabel permodalan akan berpengaruh pada faktor likuiditas, Kualitas Aktiav Produktif dan Rentabilitas bank. Oleh karena itu analisis dalam thesis ini dilakukan terhadap faktor CAMEL di Bank BPD Jawa Tengah.

Gambar 1. Kerangka Tahapan Pemikiran Teoritis



Sumber : Disusun untuk penelitian, 1999

1.6. Definisi Operasional

Untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

- 1.6.1 Rekapitaliasi adalah penyusunan kembali jumlah lembar saham / jumlah modal yang dilakukan secara suka rela dengan perhatian pemegang saham untuk masing-masing jenis sekuritas tanpa memandang wilayah pengadilan.
- 1.6.2 Capital Gap adalah kesenjangan modal yang dipengaruhi oleh perkembangan usaha, pertumbuhan modal intern dan volume modal awal bank.
- 1.6.3 Capital Adiquacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara Total modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- 1.6.4 Modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemiliknya untuk mendirikan perusahaan atau untuk membiayai operasi perusahaan/bank disamping untuk memenuhi regulasi otoritas moneter.
- 1.6.5 ATMR adalah aktiva yang mengandung risiko sesuai dengan bobot yang ditentukan oleh otoritas moneter. Aktiva tersebut berisiko karena umumnya penempatan aktiva tersebut bertujuan untuk memperoleh pendapatan bank.

1.6.6 Internal Capital Generation Rate adalah pertumbuhan modal intern yang dipengaruhi oleh leverage ratio, ROA dan Retention Ratio.

1.6.7 Leverage ratio yaitu total aktiva bank dibagi dengan total modal bank.

1.6.8 Return on Assets ratio yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

1.6.9 Earning Retention ratio adalah laba ditahan dibagi dengan total laba.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank BPD Jawa tengah. Berbeda dengan studi statistik yang menekankan pada kekeluasaan serta berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel, maka pada studi kasus ini lebih menekankan kepada kedalaman, analisis konteks secara penuh berdasarkan peristiwa atau kondisi dan hubungannya satu dengan yang lain. Dalam Penelitian studi kasus sangat cocok untuk penyelesaian masalah, evaluasi dan strategi (William Emory). Seperti yang terjadi di BPD Jawa Tengah bahwa peristiwa rekapitalisasi perlu dikaji secara mendalam dan dilakukan analisis

secara penuh agar dapat memberikan solusi serta evaluasi untuk strategi bank tersebut.

1.7.2 Jenis Data

Dalam Penelitian ini digunakan data sebagai berikut:

1.8.2.1 Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian, dalam hal ini misalkan berupa laporan keuangan, informasi perkreditan, funding, SDM dan sebagainya.

1.8.2.2 Data sekunder yaitu data atau kajian yang dibuat pihak lain untuk keperluan penelitian ini. Pengambilan data sekunder dilakukan untuk menghindari inefisiensi pengambilan data primer. Artinya bila usaha mencari tahu melalui data primer adalah percuma sebab sudah ada kajian yang relevan dengan bidang itu. Data ini meliputi kajian terhadap kebijakan rekapitalisasi di Indonesia, kajian Capital Adequacy Ratio (CAR) dan sebagainya.

1.7.3. Sumber data

Sumber data diperoleh dari Bank BPD Jawa Tengah dan Bank Indonesia serta media massa.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik yaitu :

1.7.4.1 Observasi yaitu melakukan pengamatan sebagai penelitian awal pada obyek yang dituju untuk memperoleh data primer dari BPD Jawa Tengah.

1.7.4.2 Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung secara mendalam dengan pihak manajemen BPD Jawa Tengah. Pihak-pihak dimaksud adalah direktur yang bertanggung jawab, Komisi Aktiva-pasiva (Assets-Liability Committee /ALCO), Divisi Perkreditan, Divisi SDM, Divisi Penghimpunan Dana (Funding), EDP, Bagian Operasional dan sebagainya. Wawancara ini menggunakan daftar quesiner yang sudah baku (lihat lampiran 2)

1.7.4.3.Studi Pustaka yaitu melakukan penelitian secara mendalam terhadap literatur maupun media massa terutama yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan otoritas moneter dibidang permodalan bank.

1.7.5 Metode Analisis

Untuk mengetahui Capital Gap harus ditentukan terlebih dahulu Pertumbuhan Modal Intern (Internal Capital Generation rate) dengan rumus sebagai berikut:

ICGR=Leverage RatioXReturn on Assets Ratio X Earning Retention Ratio.
Atau

$$\text{ICGR} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Modal}} \times \frac{\text{Laba bersih stlh pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times \frac{\text{Laba bersih stlh deviden}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Capital Gap=(Total Assets : Leverage ratio)- (Modal Awal + Pert. Modal Internal)

1.7.5.2 Untuk menganalisis kesehatan bank digunakan analisis CAMEL yaitu Capital, Assets Quality, Management, Earning Power dan liquidity. Indikator untuk masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.7.5.2.1 Faktor Modal (capital)

Faktor ini diukur dengan Capital Adequacy Ratio yaitu perbandingan antara total modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Kriteria rasionya adalah :

8% atau lebih = sehat

6,4% sampai 8% = Kurang Sehat

0% sampai 6,4% = Tidak sehat

1.7.5.2.2. Faktor Kualitas Aktiva (quality Assets)

Faktor ini terdiri dari dua komponen yaitu :

1.7.5.2.2.1 Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva Produktif. Kriterianya adalah :

Dibawah 3,35% adalah sehat

3,35 sampai 5,6% adalah Cukup Sehat

5,6% sampai 7,85 % adalah kurang sehat

Diatas 7,85 % adalah tidak sehat.

1.7.5.2.2.2 Rasio Penyisihan penghapusan Aktiva

Produktif Yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk. Kriteria rasionya adalah :

Diatas 81 % adalah sehat

66% sampai 81% adalah cukup sehat

51 % sampai 66% adalah kurang sehat

0 sampai 51% adalah tidak sehat.

1.7.5.2.3 Faktor manajemen (management)

Faktor ini dinilai berdasarkan daftar pertanyaan / pernyataan baku yang setiap pernyataan / pertanyaan untuk bank umum devisa bernilai 0,25 dengan skala penilaian 0 sampai dengan 4. Kriterianya adalah:

20,25 sampai dengan 25 adalah sehat

16,50 sampai 20,25 adalah cukup sehat

12,50 sampai 16,50 adalah kurang sehat

0 sampai 12,50 adalah tidak sehat.

1.7.5.2.4 Faktor Earning Power

Faktor ini dinilai dari dua komponen rasio yaitu:

1.7.5.2.4.1 Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bula terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Kriteria Rasionya adalah:

Diatas 1,22% adalah sehat

0,99% sampai 1,22% adalah cukup sehat

0,77% sampai 0,99% dalah kurang sehat

0 sampai 0,77% adalah tidak sehat.

1.7.5.2.4.2 Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama. Kriteria rasio ini adalah:

Dibawah 93,52% adalah sehat

93,52% sampai 94,72% adalah cukup sehat

94,72% sampai 95,92% adalah kurang sehat

Diatas 95, 925 adalah tidak sehat.

1.7.5.2.5 Faktor Likuiditas (liquidity)

Faktor ini dinilai dari dua komponen rasio yaitu:

1.7.5.2.5.1 Rasio kewajiban Bersih Call Money Terhadap Aktiva lancar dalam valuta rupiah. Kriteria rasionya adalah

Dibawah 18% adalah sehat

18% sampai 33% adalah cukup sehat

33% sampai 48% adalah kurang sehat

diatas 48% adalah tidak sehat.

1.7.5.2.5.2 Rasio Kredit terhadap dana yang diterima dalam valuta rupiah maupun valuta asing. Kriteria rasionya adalah:

Dibawah 93, 75% adalah sehat

93,75 sampai 97,5% adalah cukup sehat

97,50% sampai 101,25% adalah kurang sehat

101,25% sampai 115 atau diatasnya adalah tidak sehat.

BAB II.

LANDASAN TEORI

Perkembangan dunia perbankan sangat pesat setelah adanya deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada Juni 1983. Deregulasi tersebut telah mengakibatkan kebutuhan dana secara langsung maupun tidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya perbankan baik menyangkut perkembangan produk perbankan, jumlah bank maupun jumlah cabang yang pada gilirannya semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan.

Kondisi perbankan yang sarat dengan pertumbuhan (ekspansif) dapat dilihat hingga awal 1997. Ketika pertengahan 1997 terjadi krisis ekonomi dan moneter, maka perbankan nasional sebagian bankrut. Perbankan nasional mengalami kekurangan likuiditas sebagai akibat terdepresiasi nilai rupiah terhadap dollar US, pelanggaran rambu-rambu kesehatan bank, pelanggaran etika perbankan, kredit macet dan sebagainya. Gambaran perbankan sangat kontras dengan sebelum krisis ekonomi terjadi.

Hal yang disampaikan di atas mengindikasikan bahwa bisnis perbankan memerlukan sikap yang hati-hati terutama dalam menghadapi perubahan. Bahwa produk bank sebagian besar sangat dipengaruhi oleh

perubahan pasar. Perubahan nilai uang dan perilaku suku bunga adalah harus disikapi secara profesional. Bank harus selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara memelihara likuiditas yang memadai, tanpa mengorbankan kepentingan memperoleh profit dan mematuhi regulasi-regulasi yang bersentuhan dengan bidang perbankan. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana perbankan.

Pemahaman mengenai manajemen dana bank akan lebih lengkap bila dipahami terlebih dahulu mengenai bank, karakteristik bank, sistem perbankan, tujuan dan sasaran serta kendala operasional bank.

2.1. Pengertian Bank

Pengertian bank pada mulanya sangat beragam. Setiap pakar akan mendefinisikan bank dari sudut pandangnya masing-masing. Pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian ataupun definisi perbankan.

2.1.1. Menurut Joseph Sinkey (1988), bahwa yang dimaksud bank adalah *departement store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.

2.1.2. Menurut *Dictionary of Banking and financial service* by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu,

mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

2.1.3. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (revisi UU No. 14 Tahun 1992) bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan memperhatikan pengertian perbankan yang diungkap di atas maka dapat dikatakan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2. Karakteristik Usaha Perbankan

Beberapa karakteristik perbankan yang perlu kita ketahui adalah bahwa *pertama* bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan itu berdasar falsafah kepercayaan.

kedua adalah bahwa bank juga merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan pemeliharaan kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit dan likuiditas yang cukup.

Ketiga bahwa pengelola bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya. Hal tersebut perlu dilakukan karena bank dalam usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee base income* (pendapatan non bunga). Untuk itu strategi penghimpunan dan penempatan dana bank perlu dilakukan secara hati-hati agar likuiditas terpelihara dan profitabilitas tercapai secara wajar. *Keempat* adalah bahwa bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan.

Sedangkan secara operasional bank mempunyai ciri khas yaitu aktiva tetapnya relatif rendah, hutang jangka pendeknya lebih banyak jumlahnya dan perbandingan antara aktiva dengan modal (*financial leverage*) sangat besar.

2.3. Sistem Perbankan Indonesia

Bank di Indonesia dapat beroperasi secara nasional, internasional melalui jaringan cabang bank yang bersangkutan. Namun

juga terdapat bank yang hanya beroperasi di wilayah tertentu walaupun memiliki kemampuan untuk membuka jaringan yang lebih luas. Hal demikian adalah sangat tergantung dari sistem perbankan yang dianut bank yang bersangkutan.

Pengertian sistem perbankan adalah jaringan yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga perbankan yang terdiri dari BI, Bank Umum dan BPR, sementara sistem perbankan juga dapat dipandang jaringan yang terintegrasi dengan Bank Umum dan BPR saja. Dalam uraian buku ini akan diuraikan dalam konteks yang kedua.

Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia ada dua macam yaitu:

2.3.1 Unit Banking Sistem, yaitu suatu sistem yang menyebutkan bahwa berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Pada sistem ini bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja / distrik / atau terbatas pada kota atau propinsi masing-masing. Bank yang menganut sistem ini di Indonesia misalnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank BPR memang ada di seluruh Indonesia, namun setiap kota berdiri sendiri. Pada bank yang menganut sistem ini secara umum biasanya memiliki ciri-ciri organisasinya relatif kecil, ruang lingkup operasi terbatas,

delegasi wewenang masih terbatas, keputusan kredit lebih cepat karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan langsung ditangani direktornya. Kelemahannya adalah pada sistem ini bisa mengakibatkan terhimpunnya kekuasaan /sentralistik

2.3.2 *Branch Banking Sistem*, yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasionalnya sangat luas /tidak pada wilayah tertentu saja. Contoh sistem ini adalah yang dianut oleh bank-bank nasional (Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan lain-lainnya). Ciri-ciri bank yang menganut sistem ini adalah.:

2.3.2.1 Bank untuk melakukan diversifikasi produk lebih bervariasi guna Jaringan cabang /opersainalnya luas.

2.3.2.2 Bank dapat melakukan intermediary lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian.

2.3.2.3 Bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru sebagai pusat pertumbuhan sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat setempat.

2.3.2.4 Kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang cenderung membuat rencana jangka pendek.

2.3.2.5 Delegasi wewenang lebih jelas dan mantap terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang. Biasanya ada cabang kelas I, II dan seterusnya yang memiliki kewenangan kredit yang berbeda.

2.3.2.6 Sistem ini lebih memungkinkan mendorong menjangkau pasar terdekat dengan cabang-cabangnya.

Namun perlu kita ketahui bahwa sistem ini akan menjadi kendala ketika suatu cabang menerima permohonan kredit yang bukan kewenangannya. Proses perkreditan menjadi lebih lama karena harus melalui kantor pusat. Di samping itu dengan sistem ini akan merugikan bank bila delegasi wewenang dari pusat ke cabang tidak diikuti kemampuan manajerial / SDM di tingkat cabang-cabang bank bersangkutan.

2.4. Lingkungan Perbankan

Bank adalah lembaga yang berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut menjadi lingkungan perbankan. Lingkungan Perbankan dibedakan menjadi tiga yaitu lingkungan internal, lingkungan eksternal dan lingkungan internasional.

2.4.1. Lingkungan internal :

Lingkungan internal adalah lingkungan perbankan. Dalam lingkungan internal, bank mempunyai dua kedudukan

yaitu sebagai peserta dalam persaingan antar bank dan sebagai bagian organik sistem perbankan.

2.4.2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah lingkungan berganda (multiple environment), dengan kata lain sebagai lingkungan yang rangkap atau berlapis-lapis. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan fisik, teknologi, hukum, sosial-demografi, ekonomi, lingk. usaha, ekonomi makro, politik, dan persaingan. Sementara pihak-pihak yang penting bagi bank dalam lingkungan ini adalah rumah-tangga-rumah tangga, unit-unit pemerintahan dan perusahaan-perusahaan nonfinansial.

2.4.2 Lingkungan Internasional

Komponen yang relevan dengan lingkungan internasional adalah monetisasi perekonomian dunia, tingkat dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang internasional atau sebaliknya, kecukupan cadangan devisa, inflasi relatif, suku bunga relatif, laju pertumbuhan ekonomi bangsa dan persaingan internasional.

Setiap bank menghadapi tiga jenis persaingan sesuai dengan jenis lingkungannya. Artinya dalam lingkungan internal, bank akan bersaing antar bank. Dalam lingkungan eksternal bahwa bank akan bersaing dengan lembaga bukan bank atau toko-toko penjual

barang dan dalam lingkungan internasional bahwa bank akan bersaing dengan bank domestik maupun bank asing, lembaga keuangan bukan bank luar negeri dan toko-toko barang pihak asing.

2.5. Tujuan , Sasaran dan Kendala Operasional Bank

Dalam operasionalnya, bank akan menghimpun dan menempatkan dana baik yang berbunga (Interest bearing product) maupun yang tidak berbunga (non interest bearing product). Namun sudah menjadi ciri umum bahwa perbankan konvensional adalah dengan sistem bunga, oleh karena itu posisi neraca bank akan didominasi oleh interest bearing product. Interest bearing product terdiri dari interest bearing assets yang akan menimbulkan pendapatan bunga (Interest Income) dan interest bearing liabilities yang akan menimbulkan biaya bunga (Interest cost). Selisih antara pendapatan bunga dengan biaya bunga disebut pendapatan bunga bersih (net interest Income) , spread atau margin. Oleh karena itu wajar bila bank berusaha untuk memperoleh margin/spread atau pendapatan bunga bersih yang optimal sebagai bagian dari usaha untuk memaksimumkan pendapatan bank selain pendapatan non bunga (fee base income).

Dalam konteks rasio, indikator profitabilitas bank dapat ditentukan melalui Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE). Rasio-rasio ini sangat dipengaruhi oleh hasil usaha perbankan sebagai selisih antara interest income dengan

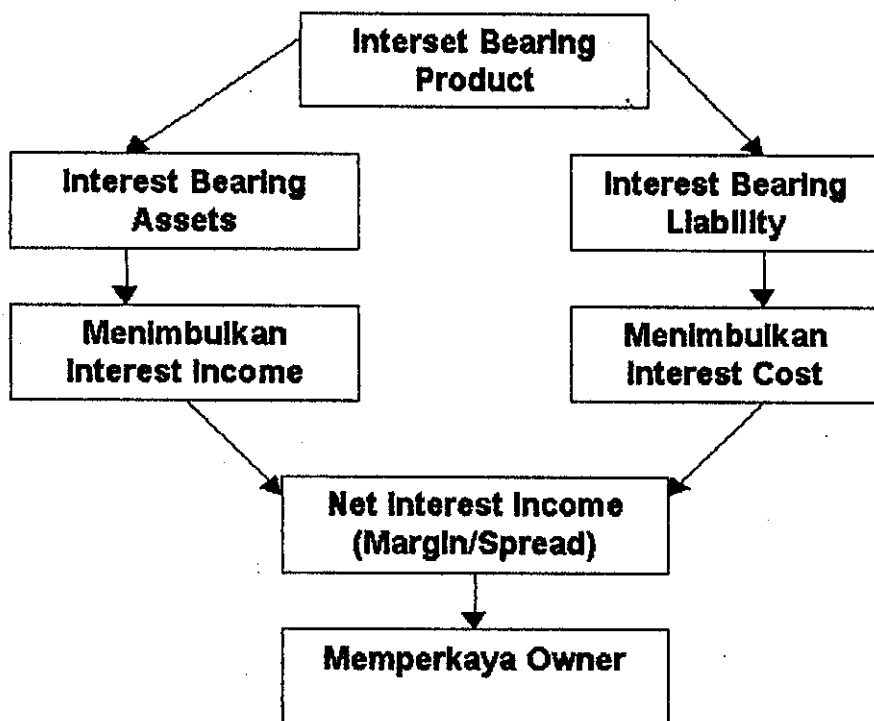
interest cost. Sedangkan napsu bank untuk memperoleh profit akan terindikasikan oleh leverage multipliernya ($LM = \text{Assets} : \text{Equity}$)

Sementara itu perlu ditegaskan bahwa pendapatan bunga sampai saat ini masih mendominasi pendapatan bank. Oleh karena itu bank akan bertindak hati-hati ketika menempatkan dana terutama pada aktiva produktif, sebab dominasi pendapatan dari aktiva ini juga diikuti meningkatnya risiko pada aktiva ini. Risiko perbankan ini tidak dapat dihilangkan, namun dapat ditekan pada tingkat yang paling minimal. Dalam hal ini bank harus bertanggung jawab untuk memelihara kualitas aktiva produktifnya pada tingkat kolektibilitas yang tinggi (lancar) serta masih dalam konteks pemeliharaan likuiditas. Hal ini perlu dilakukan bank sebab penempatan dana akan terikat dengan pengguna dana (debitur / user), artinya tidak setiap saat dapat ditarik kembali (bisa macet atau akibat komitmen terjadwal) , sementara dana yang ditempatkan bisa berasal dari masyarakat (pasiva) sehingga bank harus hati-hati agar tidak kesulitan likuiditas, bila masyarakat menariknya. Dengan demikian diharapkan kepentingan profit dan likuiditas dapat dipenuhi.

Bila bank mampu mengoptimalkan pendapatan bunga dan meminimumkan risiko , maka positive spread/margin akan dapat dicapai secara optimal. Suatu pendapatan bunga bersih yang optimal akan menjadi tujuan setiap bank yang pada gilirannya akan dapat memenuhi sasaran bank yaitu memupuk modal pemilik bank. Modal

yang cukup pada akhirnya akan mampu menutup risiko yang mungkin terjadi. Hubungan antara hal-hal tersebut seperti tampak pada skema di bawah ini.

Gambar 2. Produk Berbasis Bunga Dan Sasaran Bank



Sumber : Drs. Taswan, 2000

Kendala operasional bank

Tujuan bank untuk mengoptimalkan pendapatan dapat dicapai melalui pergerakan berbagai variabel yang dianggap dominan dalam neraca dengan memperhatikan risikonya. Persoalannya adalah ketika bank melakukan pemberdayaan terhadap variabel - variabel

tersebut tentu akan menghadapi kendala. Kendala-kendala tersebut misalnya:

2.5.1 Adanya ketentuan likuiditas minimum dalam bentuk *reserve requirement* berarti terdapat sejumlah dana tersebut yang tidak produktif untuk dicadangkan. Semakin besar *reserve requirement* berarti semakin tinggi biaya dana sebagai akibat kehilangan kesempatan untuk menempatkan dana tersebut.

2.5.2 Keharusan bank untuk memiliki modal minimum. Keharusan ini memang diciptakan oleh penguasa moneter untuk melindungi dana masyarakat, namun dengan adanya ketentuan tersebut sering menjadi kendala bagi bank-bank tertentu yang tidak mampu.

2.5.3 Adanya *conflict of interest* antara pemilik modal dengan pemilik dana yang mempercayakan kepada bank tersebut. Bagi pemilik modal ketika menempatkan dana menginginkan tingkat bunga yang tinggi tapi bagi debitur menginginkan bunga yang rendah. Begitu juga ketika menghimpun dana, bank menginginkan tingkat bunga yang rendah, namun pemilik dana menginginkan tingkat bunga yang tinggi.

2.5.4 Adanya batas maksimum Pemeberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit* . Untuk BMPK berlaku bahwa pihak terkait 10% dan pihak yang tidak terkait sebesar 20% dari modal bank.

Pihak terkait tersebut meliputi direksi/pegawai, komisaris bukan pemegang saham, pemegang saham, dan keluarga. Keluarga ini bisa berupa dari direksi, komisaris dan pemegang saham. Disamping keluarga juga termasuk pejabat bank lainnya dan perusahaan yang terkait dengan pihak-pihak yang disebutkan diatas. Sementara untuk pihak tidak terkait bisa berupa individual peminjam dan kelompok peminjam.

Kendala yang lain bersifat eksternal adalah akibat persaingan perbankan yang semakin tajam. Pada kondisi ini bank membayar biaya bunga yang relatif tinggi untuk memperoleh dana, sementara bank tidak bisa memperoleh pendapatan bunga yang tinggi. Bank harus mengikuti gerak harga /bunga pasar. Kendala-kendala yang bersifat internal maupun eksternal di atas harus disikapi bank, bukan dihindari/dilanggar. Artinya bahwa bank dalam mengoptimalkan pendapatannya harus dapat menekan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggran kendala di atas dan risiko yang lain. Oleh karena itu peran manajemen dana semakin penting. Namun demikian perlu disadari bahwa setiap kebijakan moneter akan memiliki implikasi terhadap pengelolaan dana bank.

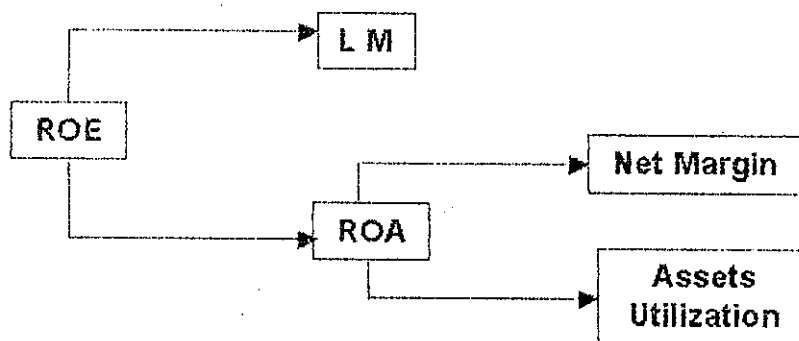
2.6. Konsep Pengukuran Pendapatan Bank

Pengukuran Pendapatan bank memang mendasarkan pada data historis yang oleh bank tidak dapat dirubahnya. Namun dengan pengukuran yang dilakukan bank tersebut akan memberikan informasi yang berharga untuk perencanaan kinerja bank di masa mendatang yang dapat diterima secara logis.

Pada dasarnya setiap perusahaan bertujuan mengoptimalkan keuntungan untuk memupuk modal pemilik. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pengukuran *return* suatu bank dapat dilakukan dengan mengadopsi teknik pengukuran *return* di perusahaan non bank, dan ini telah dikembangkan oleh *Dupont*. Alat ini dikenal dengan *dupont analysis*.

Penggunaan *dupont analysis* akan sangat tergantung pada orientasi bank, maksudnya bila bank berorientasi pada kepentingan pemilik bank maka akan digunakan pengukuran *Return on Equity*, sementara pengukuran yang lain bisa *return on assets*. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Hubungan Antara Rasio Pendapatan



Sumber : Data yang diolah, 1999

Hubungan antara rasio pendapatan bank adalah sebagai berikut:

1. Return On Equity = Leverage Multiplier X Return On Assets
2. Return On Assets = Net Margin X Assets Utilization
3. Return On Equity = Leverage Multiplier X Net Margin X Assets Utilization

$$4. ROE = \frac{\text{Assets}}{\text{Equity}} \times \frac{\text{Net Income}}{\text{Op. income}} \times \frac{\text{Operating Income}}{\text{Assets}}$$

Bahwa ROE suatu bank diturunkan dari ROA dan LM. ROA adalah *net income* dibagi dengan total aktiva. ROE merefleksikan kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk mencapai *net income*. Sementara ROA dalam beberapa regulasi perbankan masih dipercaya sebagai alat ukur efisiensi terbaik bagi bank. Namun perlu diketahui bahwa ROA pada bank secara umum lebih rendah daripada ROA pada perusahaan non bank. Oleh karena itu untuk mencapai *return on equity (ROE)* suatu bank perlu meningkatkan *leverage multiplier (LM)*-nya. LM merupakan perbandingan total aktiva dengan modal sendiri (equity). Perkalian LM dengan ROA akan menghasilkan ROE.

Sementara itu ROA juga bisa merupakan turunan dari *net margin* dengan *assets utilization*. *Assets utilization* merupakan *revenue* dengan *assets* serta merefleksikan jumlah *assets* yang diberdayakan pada aktiva produktif dan perolehan pendapatan aktiva produktif tersebut. *Net margin* adalah *net income* dibagi dengan *revenue*. *Net margin* dipengaruhi oleh *interest margin* (selisih pendapatan bunga aktiva produktif dikurangi dengan biaya bunga pada sumber dananya) dan oleh

overhead cost-nya. *Overhead cost* merefleksikan perbedaan antara *non interest expense* dengan *interest income*. Dengan kata lain bahwa tingkat margin atau net income yang direncanakan/dikehendaki bank akan sangat tergantung pada *controlable factors* dan *uncontrolable factors*. Faktor yang dapat dikendalikan manajemen umumnya berupa kombinasi bisnis (*wholesale* atau *retail banking*), *income production* (bisa berupa *net interest margin*, *service fee income*, dan *trading profit*), kualitas kredit dan biaya yang dapat dikendalikan (*controllable expenses*). Sedangkan faktor-faktor yang tak dapat dikendalikan manajemen bank adalah berupa suku bunga, kondisi ekonomi secara umum, dan lingkungan persaingan pada tempat bank berada. Terhadap *Uncontrollable factors* bank tak dapat mengendalikan, namun dapat membangun fleksibilitas ke dalam rencana operasi bank untuk melakukan reaksi terhadap setiap perubahan faktor ini.

2.7. Kualitas Aktiva Produktif Bank

Kelangsungan usaha perbankan sangat tergantung pada kesiapan menghadapi risiko atau kualitas penanaman dananya. Untuk itu setiap bank perlu memelihara kualitas Aktiva Prioduktifnya. Kualitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif didasarkan pada *pertama* ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta

kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan, untuk kredit yang diberikan. *Kedua* adalah didasarkan pada tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan, untuk surat berharga. Pemeliharaan kualitas tersebut dilakukan secara terukur agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan operasional bank. Pengertian kredit disini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, termasuk di dalamnya pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)* dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Sedangkan yang dimaksud dengan surat berharga di sini adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritaas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat

Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (commercial Papers), Sertifikat Reksadana, dan *medium term note*. Sedangkan yang dimaksud penanaman dana antar bank adalah penanaman pada bank lain dalam bentuk giro, *call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penempatan lainnya. Sementara yang dimaksud penyertaan adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (off balance sheet) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi / endosemen, *Irrevocable Letter Of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C Berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat *repurchase agreement (repo)*, *stanby L/C* dan garansi lainnya serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko kredit.

Untuk menilai kolektibilitas masing-masing jenis aktiva produktif maka dapat digunakan pedoman sebagai berikut:

2.7.1. Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan

Untuk kualitas kredit dapat ditetapkan menurut klasifikasi / kolektibilitasnya yaitu :

2.7.1.1. Lancar (Pass), apabila memenuhi kriteria:

1. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan

1. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif ; atau
3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2.7.1.2. Dalam Perhatian Khusus (Special mention), apabila memenuhi kriteria:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampau 90 hari ; atau
2. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
3. Mutasi rekening relatif aktif; atau
4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ; atau
5. Didukung oleh pinjaman baru.

2.7.1.3. Kurang lancar (Substandard), apabila memenuhi kriteria:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
2. Sering terjadi cerukan; atau
3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau

5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur ; atau
6. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

2.7.1.4. Diragukan (Doubtful), apabila memenuhi kriteria:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
4. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

2.7.1.5. Macet (Loss), apabila memenuhi kriteria:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

2.7.2. Kolektibilitas Surat Berharga

2.7.2.1. Lancar

1. Sertifikat bank Indonesia (SBI), dan Surat Hutang pemerintah.
2. Surat Berharga Pasar uang (SBPU) yang belum jatuh tempo.
3. Surat Berharga Komersial (Commercial papers/CPs) yang belum jatuh tempo dengan peringkat IdA1, IdA2, IdA3, IdA4 sebagaimana ditetapkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pepindo) atau yang setingkat dengan itu dari lembaga pemeringkat yang memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh masyarakat.
4. Obligasi yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal, belum jatuh tempo, dan kupon selalu dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat.
5. Sertifikat Reksadana yang memiliki prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk surat berharga komersial atau obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4.

2.7.2.2. Macet

Surat berharga macet apabila tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana pada kolektibilitas lancar (huruf a).

2.7.3. Kolektibilitas Penyertaan.

Dalam menentukan kolektibilitas penyertaan dibedakan antara penyertaan pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dengan pangsa bank kurang dari 20% dengan penyertaan bank yang memiliki pangsa bank pada perusahaan dimaksud sebesar 20% atau lebih.

2.7.31. Kolektibilitas penyertaan untuk pangsa bank kurang dari

20% yaitu:

a. lancar

Perusahaan tempat penyertaan bank memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang diaudit;

b. Kurang lancar.

Perusahaan tempat penyertaan bank mengalami kerugian sampai dengan 25% dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir yang diaudit;

c. Diragukan

Perusahaan tempat penyertaan bank mengalami kerugian lebih dari 25% sampai dengan 50% dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

d. Macet

2.7.3.2. Penyertaan pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dengan pangsa bank lebih dari 20% atau lebih maupun peneyrtaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, digolongkan lancar dan wajib dicatat dengan metode equitas.

2.7.4. Kolektibilitas Penempatan Pada bank lain

Bahwa kolektibilitas penempatan pada bank lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga sebagaimana ditetapkan pada kolektibilitas kredit.

2.7.5. Kolektibilitas Rekening Administratif.

Bahwa Kolektibilitas untuk rekening administratif ditentukan sebagaimana kolektibilitas untuk kredit.

Dengan memperhatikan kolektibilitas masing-masing jenis aktiva produktif, maka selanjutnya bank diwajibkan membeniuk Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagai berikut:

- a. Cadangan Umum yang sekurang-kurangnya sebesar 1% dari total aktiva produktif
- b. Cadangan khusus untuk kredit yang diberikan yang sekurang-kurangnya sebesar:
 - 5% dari kredit diberikan yang digolongkan dalam perhatian khusus (Special mention); dan
 - 15% dari kredit diberikan yang digolongkan kurang lancar dan

- 50% dari kredit yang diberikan yang digolongkan diragukan dan
- 100 % dari kredit yang diberikan yang digolongkan macet (loss) yang masih tercatat dalam pembukuan bank.

Masing-masing setelah dikurangi dengan agunan tunai (cash collateral). Agunan tunai umumnya berupa giro, deposito atau tabungan yang diblokir oleh bank.

Sementara itu untuk cadangan khusus bagi surat berharga yang dimiliki bank sekurang-kurangnya sebesar 100% dari surat berharga yang digolongkan macet.

2.8. Likuiditas Bank

Dilema Likuiditas

Masalah likuiditas bagi bank sebenarnya tidak hanya sekedar memenuhi kecukupan, namun juga menyangkut masalah ketaatan kepada otoritas moneter, efisiensi, efektifitas dan fkesibilitas. Ketaatan likuiditas misalnya keharusan bank untuk selalu memenuhi tingkat likuiditas yang diinginkan oleh otoritas moneter melalui regulasi tertentu. Tingkat likuiditas yang diinginkan BI belum tentu memenuhi keinginan manajemen bank yang selalu menginginkan bekerja pada tingkat likuiditas yang efisien, sementara otoritas moneter lebih mementingkan perlindungan dana masyarakat. Oleh karena itu dalam menentukan likuiditas bisa berorientasi efisiensi atau ketaatan pada regulasi.

Sementara itu pengendalian likuiditas bank dalam konteks manajerial bank adalah persoalan dilematis, artinya kalau bank

selalu menginginkan bekerja pada tingkat likuiditas yang efisien, sementara otoritas moneter lebih mementingkan perlindungan dana masyarakat. Oleh karena itu dalam menentukan likuiditas bisa berorientasi efisiensi atau ketaatan pada regulasi.

Sementara itu pengendalian likuiditas bank dalam konteks manajerial bank adalah persoalan dilematis, artinya kalau bank menghendaki untuk memelihara likuiditas yang tinggi maka profit akan turun / rendah, sebaliknya kalau likuiditas rendah maka profit menjadi tinggi. Dilema tersebut sesuai dengan sifat aktiva bank seperti tampak pada tabel 1 dibawah ini. Kedua persoalan tersebut menjadi pertimbangan bank dalam menentukan tingkat likuiditas yang dikehendaki.

Tabel 1. Kontribusi Aktiva Bank Terhadap Likuiditas Dan Rentabilitas Bank

Jenis aktiva	Kontribusi Likuiditas	Kontribusi Rentabilitas
1. Kas & Giro BI	Tinggi	Nihil
2. Surat Berharga	Sedang	Sedang
3. Kredit	Rendah	Tinggi
4. Penyertaan	Sangat Rendah	Tinggi

Sumber : Data Primer diolah, 1999

Manajemen bank akan menentukan portofolio investasinya/penempatan dananya sangat tergantung kondisi likuiditas bank yang diinginkan. Bila bank menginginkan likuiditas tinggi, maka bank akan menempatkan dana pada kas & Giro BI pada porsi yang relatif besar, namun akan terjadi kerugian sebab kontribusi terhadap rentabilitas hampir dipastikan nihil. Sebaliknya bila bank terlalu mengejar laba dengan

Kewajiban tersebut sering diartikan sebagai hutang. Pengertian ini berlaku pada perusahaan non bank yang memandang kewajiban riil saja yang tercermin disisi pasiva pada neraca. Berbeda dengan bank, bahwa persoalan likuiditas adalah dipandang dari dua sisi pada neraca bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit yang wajar. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan (komitmennya). Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank tersebut akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu pengertian likuiditas bank adalah lebih luas daripada likuiditas pada perusahaan non bank, yaitu bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan /penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit.

Kategori Likuiditas Bank

Menurut Oliver G. Wood, Jr dari University of South carolina bahwa suatu bank dianggap likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

Kategori Likuiditas Bank

Menurut Oliver G. Wood, Jr dari University of South carolina bahwa suatu bank dianggap likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Memegang sejumlah alat likuid, cash assets, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat-surat berharga dengan *repurchase agreement*.

Kategori ini dilihat dari aspek manajerial bank, sementara dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap regulasi bahwa suatu bank akan dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang sehat akan ditunjukkan melalui indikator rasio. Di Indonesia indikator ini yang diharuskan bagi Bank umum adalah berupa :

- a. Rasio Giro wajib Minimum yang besarnya minimum 5% dari dana pihak ketiga untuk valuta rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing. Indikator ini digunakan untuk mengukur likuiditas harian setiap minggu.
- b. Rasio Kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva lancar. Rasio ini semakin kecil akan mengindikasikan likuiditas bank semakin baik. Untuk kasus bank-bank di Indonesia rasio yang sehat adalah bila berada dibawah 18%
- c. Rasio Kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (Loan To Deposit Ratio/LDR). Rasio ini mengindikasikan semakin kecil semakin baik. Bank Indonesia memberikan pedoman antara 89% sampai 115%. Namun angka yang sehat sebenarnya kalau LDR berada dibawah 93,75%.

Untuk kepentingan evaluasi kinerja likuiditas tahunan suatu bank, otoritas moneter menggunakan indikator b dan c.

Fungsi Likuiditas

Sedangkan fungsi Likuiditas menurut Yoseph Sinkey adalah ada lima fungsi yaitu:

- a. Untuk menunjukkan dirinya / bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.
- b. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya.
- c. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.

- d. Untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank sentral.
- e. Memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya

2.9 Faktor Permodalan Bank

2.9.1. Pengertian Modal Bank

Sebuah bank didirikan untuk jangka waktu tak terbatas, artinya manajemen bank selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan operasi bank. Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan lembaga perbankan diperlukan daya saing yang memadai. Untuk dapat bersaing sebuah bank harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan selalu berusaha menekan risiko, bank harus dapat menciptakan pengembangan sistem dan prosedur pelayanan serta sistem informasi yang memungkinkan terselenggaraanya kegiatan operasional bank semakin lancar dan juga bank harus memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak aktifitas.

Pengertian modal yang cukup atau sehat masih menjadi perdebatan para pakar perbankan maupun penguasa moneter. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan kepentingan. Setiap bank mempunyai karakteristik *leverage* dan tingkat

insolvency yang berbeda. Sementara penguasa moneter lebih berlandaskan pada perlindungan dana masyarakat.

Secara konseptual bahwa pemilikan modal bank yang terlalu besar akan merugikan bank karena tingkat keuntungan justeru akan menurun, dan sebaliknya modal yang terlalu kecil akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Dengan demikian modal bank tidak hanya berperan sebagai dana yang siap dioperasikan, tetapi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pengelolaan risiko dan *return* suatu bank (Return-Risk Tradeoff).

Lantas apa yang dimaksud modal bank ?. Pengertian dan definisi tentang modal bank cukup banyak, namun sebenarnya yang dimaksud modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Pengertian tersebut merupakan perpaduan antara kepentingan pemilik bank dengan pengawas bank (otoritas moneter)

2.9.2 Bentuk Dasar Modal Bank

Berbagai jenis modal bank dapat diklasifikasikan yang secara garis besar menurut George Hempel bahwa modal bank pada hakekatnya ada tiga kelompok yaitu:

- Subordinated debt, yaitu hutang kepada pihak lain yang pelunasannya hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada kreditur lainnya misalnya penitip dana. Subordinated debt biasanya berbunga, bank akan membayar bunga tertentu di masa mendatang.
- Preferred Stock, yaitu sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang kewajiban untuk membayar deviden dalam jumlah tertentu hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran kepada penitip dana (deposan)
- Common Stock, yaitu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang biasanya terdiri dari dana saham, harga saham diatas pari, cadangan modal dan laba ditahan.

Sementara itu pengklasifikasian modal menurut Ctoritas Moneter adalah:

- a) First Tier Capital; modal utama yang tertanam di bank tersebut.
- b) Secound Tier Capital; sejumlah dana modal yang bukan bersumber dari pemilik/pemegang saham bank tersebut.

2.9.3 Fungsi Modal Bank

Fungsi Modal bagi bank adalah untuk:

- 2.9.3.1 Untuk melindungi deposan dengan menangkai semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan misalnya terjadinya

insolvency dan likuidasi bank. Perlindungan ini untuk dana yang tidak diasuransikan/dijamin oleh pemerintah.

2.9.3.2.1 Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.

2.9.3.3 Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan dan sebagainya.

2.9.3.4 Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter.

2.9.4. Prinsip Dasar Manajemen Modal Bank

Pengelolaan modal bank terfokus pada kecukupan untuk membiayai operasi bank atau untuk memenuhi berbagai kepentingan. Prinsip manajemen modal akan tercermin dari langkah-langkah dalam memperhitungkan kebutuhan modal yang memadai, yaitu:

- a) Menyusun rencana keuangan secara
- b) menyeluruh untuk mengetahui kebutuhan modal.
- c) Mengusahakan pemenuhan modal dari internal tanpa merusak kepentingan pemiliknya/pemegang saham.
- d) Mengusahakan kekurangan modal tersebut dari pihak luar.

Menyusun Rencana Keuangan Secara Menyeluruh.

Untuk menentukan modal suatu bank perlu dilakukan perencanaan menyeluruh mengenai aspek keuangan bank. Proses perencanaan tersebut harus dimulai dari analisis kinerja bank yang bersangkutan. beberapa kegagalan, kekuatan, kelemahan dan peluang yang ada harus menjadi pertimbangan manajemen bank.

Setelah menganalisis seluruh aspek keuangan bank, maka selanjutnya harus mengidentifikasi variabel-variabel pokok yang dianggap sangat vital dalam operasi bank. Variabel vital tersebut umumnya berupa perkiraan penghimpunan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dari masyarakat misalnya tabungan, giro, deposito dan kewajiban segera lainnya. Sementara pada sisi aktiva bank yang menjadi variabel utama adalah penempatan / volume kredit yang diberikan. Posisi kredit yang diberikan masih mendominasi bank-bank di Indonesia, sehingga harus mendapat perhatian serius.

Dengan neraca yang diproyeksikan (proforma), suatu bank dapat memperkirakan kebutuhan modal bank. Ketentuan $\frac{Loan}{Total\ Deposit}$ (LDR) dapat membantu menentukan modal bank. LDR adalah perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap volume dana yang diterima. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan kredit dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri. LDR yang berlaku di Indonesia adalah maksimum rasio 115%.

Variabel lain yang tidak kalah pentingnya adalah mutu sumber daya manusia yang akan menggerakkan bank. Kemampuan SDM di bank tersebut perlu dipersiapkan. Apakah dengan adanya ekspansi bahwa SDM tidak kedodoran atau semakin ahli mengelola bank. Percuma saja penambahan modal bank tidak didukung oleh SDM yang bermutu.

Pemenuhan Modal dari Internal bank

Pemenuhan modal dari internal bank merupakan harapan setiap bank. dengan terpenuhinya modal dari internal maka menunjukkan bahwa bank tersebut mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri yaitu dari sisa laba bank. Untuk mempertinggi laba bank diperlukan *financial leverage*. *Financial leverage* adalah variabel untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva. Rasio yang digunakan adalah leverage multiplier yaitu perbandingan antara total aktiva dengan total modal bank.

Perhatian terhadap leverage multiplier bank menjadi penting karena karakteristik usaha bank yang berbeda dengan usaha non bank. Bagi bank untuk beroperasi tidak akan membutuhkan modal yang relatif besar bila dibandingkan dengan perusahaan non bank pada skala yang sama. Sebagai ilustrasi berikut profil di perusahaan non bank (PT A) dan Bank B.

Tabel 2. Ilustrasi Kebutuhan Modal Bank

Keterangan	PT A	Bank B
Assets	1.000	1.000
Equity	400	100
Net Earning	100	10
Equity/Assets	40%	10%
Return On Assets	10%	1%
Leverage Multiplier	2,5 X	10X
Return On Equity	25%	10%

Sumber: Data Primer diolah, 1999

Bila dilihat ROE-nya memang untuk Bank B relatif lebih kecil dibandingkan dengan ROE di PT A. Hal ini wajar saja karena modalnya lebih besar di PT A. Tetapi perolehan ROE di Bank B adalah 10% dan ini tentu hal yang sangat memuaskan bagi para pemilik saham di Bank B. Dengan beroperasi modal yang relatif kecil Bank B mampu memberikan manfaat keuntungan yang lebih baik mengingat leverage multiplier mencapai 10X daripada PT A yang hanya sebesar 2,5 x. Ini menunjukkan bahwa pada skala usaha yang sama dengan perusahaan non bank, untuk mengoperasikan bank tidak diperlukan modal sebesar pada perusahaan non bank. Para pemilik bank dapat mengandalkan dana masyarakat untuk mengimbangi pertumbuhan asssetsnya. Tapi ini bila dihadapkan pada regulasi perlindungan dana deposan akan sangat berbahaya. Oleh karena itu otoritas moneter membatasi modal minimum / Capital Adequacy Ratio.

1. Leverage ratio; total aktiva dibagi dengan modal bank
2. Retrn On Assets; laba setelah pajak dibagi dengan Total Aktiva.
3. Earning Retention; laba ditahan dibagi dengan total laba.

Selanjutnya ICGR dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$ICGR = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Modal}} \times \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times \frac{\text{Laba setelah Deviden}}{\text{Total Laba}}$$

Laba setelah deviden atau disebut retention adalah merupakan laba yang diperoleh selama tahun berjalan dan dikurangi dengan deviden yang dibayarkan, sehingga bisa dirumuskan bahwa:

$$\text{Profil} = \text{Payout} + \text{Retention}$$

atau payout ratio ditambah dengan retention ratio sama dengan 1 .

Payout ratio adalah perbandingan antara deviden dengan total laba tahun berjalan. Rumus selanjutnya adalah:

$$\text{Payout ratio} + \text{Retention ratio} = 1$$

2.9.5. Menentukan Kecukupan Modal Bank di Indonesia

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan perbankan di Indonesia harus mengikuti ukuran yang berlaku secara international . Menurut Sandard Bank For International Settlements, masing-masing negara dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam menerapkan

$$\text{Payout ratio} + \text{Retention ratio} = 1$$

2.9.5. Menentukan Kecukupan Modal Bank di Indonesia

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan perbankan di Indonesia harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional. Menurut Standard Bank For International Settlements, masing-masing negara dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam menerapkan prinsip-prinsip perhitungan kecukupan permodalan bank dengan menyesuaikan kondisi ekonomi di suatu negara. Untuk Indonesia juga melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu walaupun secara prinsip tetap berpedoman pada Bank For International Settlements (BIS).

Kewajiban penyediaan modal minimum/kecukupan modal harus berdasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas., baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum/kecukupan modal diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap.

Modal Inti

Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba

yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal inti dimaksud merupakan modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Sedangkan agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi harga nominalnya.

Modal inti juga terdiri dari modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Cadangan umum juga termasuk modal inti, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak, dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

Cadangan tujuan, yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. Sedangkan laba ditahan dimaksudkan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. Laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun berjalan hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%.

Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman

subordinasi. Secara rinci modal pelengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal pajak.
- b. Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan., dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
- c. Modal Pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
- d. Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan Bank Indonesia dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh

tempo harus mendapatkan persetujuan BI serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank dilikuidasi.

Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (kecukupan Modal).

Dengan surat keputusan Direksi BI No. 26/20/Kep/DIR dan SE BI No. 26/2/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, telah ditetapkan kewajiban penyediaan modal minimum. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut Risiko. sebesar 8%. Kewajiban penyediaan Modal Minimum atau capital Adequacy ratio tersebut pada dasarnya suatu ukuran modal yang diharapkan dapat menjamin bahwa bank yang beroperasi secara internasional maupun nasional akan beroperasi secara baik atau prudent.

Menurut standard Bank for International Settlements, masing-masing negara dapat menyesuaikan dalam penerapan prinsip-prinsip perhitungan permodalan dengan memperhatikan kondisi ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Berdasarkan Paket Mei 1993, penyediaan modal minimum harus sebesar 8% dari ATMR. Angka tersebut dipenuhi secara bertahap yaitu 5% sejak akhir maret 1992, meningkat menjadi 7% sejak akhir maret 1993 dan menjadi 8% sejak akhir Desember 1993. Kebijakan tersebut kemudian direvisi oleh Menteri Keuangan RI sebagai akibat perubahan kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi yang semakin terpuruk mengakibatkan modal bank terkuras oleh

kerugian baik akibat terdepresiasi nilai rupiah terhadap dollar US maupun akibat kerugian kredit macet. Kebijakan CAR sebesar 8% dipandang tidak mampu dipenuhi segera untuk itu pada tahun 1998 ditetapkan minimum 4% untuk Bank Umum Nasional dan 8% untuk Bank pembangunan Daerah dan BPR

Tata cara Perhitungan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) untuk Bank Umum.

Perhitungan rasio kecukupan modal bagi Bank Umum didasarkan pada aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). pengertian aktiva disini adalah menyangkut aktiva yang tercantum dalam neraca bank maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank untuk pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta agunan. Khusus terhadap kredit-kredit yang penarikannya secara bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap yang bersangkutan.

(1.). Bobot Risiko Aktiva Neraca

Rincian bobot risiko untuk semua aktiva neraca bank baik dalam rupiah maupun valuta asing adalah sebagai berikut:

0% untuk:

- a. Kas
- b. Emas dan mata uang emas
- c. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Pusat RI: Bank Indonesia; Bank sentral negara lain; pemerintah Pusat Negara lain.
- d. Tagihan yang dijamin dengan uang, uang kertas asing, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya.

20% untuk ;

Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh;

- a. Bank-bank didalam negeri (termasuk kantor cabang yang berada diluar negeri).
- b. Pemerintah daerah Indonesia.
- c. Lembaga Non Departemen di Indonesia.
- d. Bank-bank pembangunan Multilateral seperti ADB, IDB, IBRD, AFDB dan EIB.
- e. Bank-Bank utama (prime bank) di luar negeri.

50% untuk:

- 1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni.

2. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan Milik Pemerintah Pusat lain.

100% untuk:

1. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh:
 - a. Badan Usaha Milik pemerintah daerah (BUMD)
 - b. Koperasi
 - c. Perusahaan Swasta.
 - d. Perorangan.
 - e. Lain-lain.
2. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan, termasuk penyertaan pada bank lain.
3. Aktiva Tetap dan inventaris (sebesar nilai buku)
4. Rupa-rupa aktiva.
5. Antar kantor Aktiva neto yaitu antar kantor aktiva dikurangi antar kantor pasiva.

(2.). Bobot Risiko Aktiva Administratif

Dalam menghitung bobot aktiva administratif dilakukan melalui dua tahap yaitu:

1. Tahap Pertama.

Bahwa aktiva administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversi aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. besarnya faktor konversi untuk masing-masing aktiva administratif didasarkan pada tingkat kemungkinannya untuk menjadi aktiva neraca yang efektif. Rincian faktor konversi untuk aktiva administratif baik rupiah maupun valuta asing adalah sebagai berikut:

Bobot Konversi 20% untuk:

L/C yang masih berlaku (tidak termasuk Standby L/C)

Bobot 50% untuk:

- a. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, performance bonds dan advance bonds.
- b. Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun takwin berjalan.

Bobot Konversi 100% untuk:

- a. Kewajiban membeli kembali atas aktiva bank yang dijual dengan syarat repurchase agreement.
- b. Jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit, serta endosmen atau aval; surat-surat berharga.

2. Tahap Kedua.

Setelah diketahui faktor konversinya, maka masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan kedalam aktiva -aktiva neraca padanannya. Kemudian dapat menghitung bobot risiko administratifnya dengan cara mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko neraca padanannya. Atas dasar perhitungan tersebut maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif menjadi sebagai berikut:

Bobot 0% untuk:

a. Fasilitas yang disediakan bagi atau oleh Pemerintah Pusat RI dan bank Indonesia, serta bank sentral dan pemerintah Pusat Negara lain yang meliputi:

- Fasilitas Kredit yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwin yang berjalan.
- Jaminan (termasuk syanby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat - surat berharga .
- Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka kredit seperti bids bonds, performance bonds dan advance payment bonds.
- L/C yang masih berlaku (tidak termasuk stanby L/C)

- Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, performance bonds, advance payment Bonds.
- b. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk Standby L/C) dan dibuka atas permintaan BUMN, atau perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.

Bobot 20% untuk:

- a. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk Standby L/C) dan dibuka atas permintaan BUMD, koperasi, Perusahaan swasta, perorangan dan lain-lain.
- b. Jaminan (termasuk Standby L/C) dari risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endorsemen atas aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan bank-bank didalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Pemerintah daerah di Indonesia Lembaga Non departemen di Indonesia. Bank-Bank Utama (prime Bank) di Luar Negeri.

Bobot 25% untuk:

Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin BUMN dan Perusahaan Milik Pemerintah Pusat negara lain yang meliputi:

- Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.

- Jaminan bank yang belum digunakan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, Performance bonds, advance Payment Bonds.

Bobot 50% untuk:

a. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh BUMD, koperasi, Perusahaan Swasta, perorangan dan lain-lain meliputi:

- Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan sampai akhir tahun takwim berjalan.
- Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid Bonds, performance Bonds, advance payment Bonds.

b. Jaminan (termasuk Standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endowment atau aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan BUMN dan Perusahaan Milik Pemerintah Pusat negara lain.

Bobot 100% untuk:

a. Jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endowment atau aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan BUMD, Koperasi, Perusahaan swasta, perorangan dan lain-lain.

- b. Kewajiban membeli kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repurchase agreement (repos).

2. 10 Restrukturisasi Dan Rekapitalisasi Perbankan

Istilah Restruturisasi dan Rekapitalisasi sangat populer di Indonesia ketika krisis ekonomi dan moneter terjadi dan mengakibatkan sebagian besar perusahaan-perusahaan raksasa dalam negeri mengalami kebangkrutan. Begitu populernya sehingga masyarakat sering tidak membedakan pengertian restrukturisasi dan rekapitalisasi. Sementara itu di dunia Internasional istilah tersebut populer sejak era 1980-an yaitu ketika terjadi proses liberalisasi ekonomi yang semakin marak dan di negara eropa timur istilah ini sering dikaitkan dengan privatisasi *The Industrial Restructuring Corporation (IRC)*, AS, mengutip Allan H. Seed III bahwa yang dimaksud restrukturisasi adalah *a substantial change in business startegy and or financial structure of the under performing enterprise* (James B. Edgerly, 1992). Sedangkan komite retrukturisasi dari Kementerian Privatisasi Polandia memberikan pengertian yang lebih komprehensif yaitu *organizational, managerial, financial, product and technical adaption of companies to market conditions in order to increase their operation Efectiveness* (James B. Edgerly, *ibid*)

Menurut pakar keuangan dari UGM yaitu Bambang Riyanto, Phd (1994) bahwa yang dimaksud restrukturisasi adalah penyusunan kembali perimbangan keuangan dalam konteks kualitatif, berbeda dengan

rekapitalisasi yang merupakan penyusunan kembali perimbangan keuangan dari aspek kuantitatif. Penyusunan kembali jumlah modal tersebut dilakukan secara sukarela tanpa memandang wilayah pengadilan seperti reorganisasi (Bambang Riyanto, *ibid*). Dengan kata lain bahwa recapitalisasi merupakan penyusunan kembali struktur modal khususnya dan struktur finansial pada umumnya (Wasis, 1983). Recapitalisasi adalah proses untuk mengubah dan atau memperbaiki struktur kapital atau pembelanjaan perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai usaha. Yang dimaksud kapital disini adalah hutang (*long term debt dan atau Interest bearing debt*) dan Ekuitas.

Restrukturisasi dan Recapitalisasi biasanya dilakukan terhadap perusahaan atau bank yang dianggap *under performing* atau *under capitalized*. Oleh karena itu tidak heran istilah ini populer ketika di Indonesia terjadi krisis ekonomi dan moneter yang menyebabkan perusahaan-perusahaan termasuk bank mengalami kondisi *non performing* (*distress enterprise*, bukan sekedar *under performing*). Tujuan restrukturisasi dan recapitalisasi adalah untuk menyesuaikan struktur modalnya dengan perkembangan/kondisi perusahaannya agar kembali ke keadaan *properly capitalized*, untuk menyederhanakan struktur modalnya atau bahkan untuk mempercepat proses merger.

Penyesuaian kembali ke keadaan *properly capitalized* di Indonesia umumnya perusahaan-perusahaan atau bank-bank telah mengalami *under capitalized* yaitu akibat beroperasi dengan rugi karena

turunnya permintaan atau adanya *negative spread*, utilisasi kapasitas yang tidak penuh dan beban hutang yang berat. Bank-bank dalam kondisi ini jelas tidak mampu memenuhi *capital providers* (dan *Stakeholders*-lainnya). Pada kondisi ini alternatif solusi fundamental untuk pemulihan perbankan dan peningkatan kinerja usaha perbankan adalah restrukturisasi dan rekapitalisasi terhadap modal bank

Seperti diungkapkan di atas bahwa pengertian kapital disini adalah hutang dan modal. Oleh karena itu cara melakukan rekapitalisasi yang dapat dilakukan yaitu *debt recapitalization* dan *equity recapitalization*. Rekapitalisasi dengan penambahan pembelanjaan hutang lebih populer untuk perusahaan yang pembelanjaannya adalah *heavy on equity*. Sementara untuk kasus di Indonesia adalah bahwa bank-bank atau perusahaan umumnya mengalami *heavy on debt* bahkan dengan praktek *mark up* sebuah perusahaan bisa mencapai pembelanjaan hutang sebesar 99% dan bila ini terjadi berarti secara umum penyebab utama terpuruknya bank-bank atau perusahaan sektor riil yang menjadi *under capitaized* adalah *heavy debt burden*. Oleh karena itu rekapitalisasi di Indonesia adalah *equity recapitalization* yaitu bisa melalui *debt to equity* atau *equity injection (infusion)* yaitu tambahan atau suntikan modal dari pemilik lama maupun pemilik baru yang pada gilirannya terjadi restrukturisasi permodalan bank.

Perlu diketahui bahwa program restrukturisasi tidak mesti diikuti program rekapitalisasi, akan tetapi program rekapitalisasi pasti akan

diikuti restrukturisasi keuangan (modal). Disamping itu untuk melakukan rekapitalisasi ataupun restrukturisasi tidak mesti bahwa perusahaan atau bank yang sakit dapat direkap. Secara umum dalam ilmu keuangan bahwa sebuah bank atau perusahaan akan dapat direkap kalau perusahaan dapat dibuktikan memiliki kapasitas untuk dibelanjai (*Proven Financing Capacity*) dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai likuidiasi bank tersebut, bank memiliki komitmen dan *leadership* yang solid, dan yang ketiga adalah kondisi strategis usaha adalah layak. Lantas bagaimana kriteria atau persyaratan sebuah bank mengikuti program rekapitalisasi? Program rekapitalisasi di Indonesia ditentukan berdasarkan besaran rasio kecukupan modal atau *Capital Adiquacy Ratio (CAR)*. Besaran CAR yang digunakan untuk program rekapitalisasi adalah merupakan hasil *due diligence*. Due Diligence sering diterjemahkan sebagai uji tuntas yang pada dasarnya adalah audit dan hasil analisis terhadap perusahaan yang dianggap under performing atau under capitlaized. Dengan dasar uji tuntas tersebut ditentukan kategori Capital Adiquacy Ratio suatu bank sebagai berikut:

- a) kategori A yaitu bank uum yang memiliki rasio Kecukupan penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama atau lebih besar 4%
- b) Kategori B adalah bank umum yang memiliki rasio Kecukupan penyediaan Modal Minimum atau capital Adiquacy ratio sebesar lebih kecil dari 4% sampai -25%

- c) Kategori C adalah Bank umum yang memiliki rasio kecukupan penyediaan Modal Minimum atau Capital Adequacy ratio sebesar sama dengan atau lebih kecil dari -25%.

Kategori tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan sebuah bank perlu melakukan rekapitalisasi atau tidak. Untuk bank yang masuk kategori A tidak perlu mengikuti program rekapitalisasi tetapi harus membuat business plan yang jelas. bagi bank dengan kategori C maka harus mengikuti program rekapitalisasi dengan syarat menambah modal terlebih dahulu hingga CAR-nya masuk kategori B hingga batas waktu yang ditentukan. Sementara itu bila bank sudah masuk kategori B (terasuk yang dari C ke B setelah menambah modal) selanjutnya wajib menyetor modal sebesar 20% dari kebutuhan dana rekapitalisasi pada saat program rekapitalisasi dilakukan.

2.11. Penilaian Kesehatan Bank Umum

Salah satu sarana pengawasan bagi Bank Indonesia terhadap bank-bank adalah berupa hasil penilaian kesehatan bank. Penilaian ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Bank Indonesia saja akan tetapi untuk kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank. Oleh karena itu penilaian kesehatan ini dipandang penting sebagai petunjuk kinerja manajemen bank yang bersangkutan selama kurun waktu tertentu.

Penilaian kesehatan bank adalah penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil usaha ini adalah sebagai hasil kerja manajemen terutama dalam mengelola dana.

Lantas bagaimana menilai kesehatan bank? Untuk menilai kesehatan bank, pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Assets Quality), Manajemen (management), Rentabilitas (Earning Power) dan Likuiditas (liquidity) yang selanjutnya sering disebut CAMEL

Untuk tahap pertama dilakukan dengan mengkuantitatifkan komponen-komponen yang ada dalam faktor dimaksud. Faktor dan Komponen tersebut diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank.

Penilaian terhadap faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (Reward system) yang dinyatakan dengan angka 0 sampai 100. Hasil penilaian atas bobot komponen dan faktor dapat dikurangi dengan nilai kredit atas ketentuan pelaksanaan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan hasil penilaian, maka ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan bank yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang

Sehat dan Tidak Sehat. Predikat sehat, cukup sehat dan kurang sehat dapat diturunkan predikatnya menjadi tidak sehat apabila melanggar ketentuan lainnya yaitu adanya:

1. Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Pelanggaran terhadap BMPK ini dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak terkait dengan bank terhadap modal bank. Untuk pelanggaran tersebut akan mengurangi hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan sebagai berikut: Untuk setiap pelanggaran BMPK nilai kreditnya dikurangi 5 dan; untuk setiap pelanggaran 1% pelanggaran BMPK nilai kreditnya dikurangi lagi dengan 0,05% dengan maksimum 100.
2. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan dalam bank yang bersangkutan.
3. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) Bank, termasuk di dalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
4. Window dressing dalam pembukuan dan atau laporan bank yang secara material dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
5. Praktek bank dalam bank, atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank.

6. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga; atau
7. Praktek perbankan lain yang menyimpang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan / atau menurunkan kesehatan bank.

Kriteria Untuk faktor dan Komponen Penilaian Kesehatan Bank Umum termasuk Bank Pembangunan Daerah.

2.11.1.Faktor Permodalan/Capital (Bobot 25%)

1. Penilaian terhadap faktor Permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana pada SE.BI No. 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993
2. Penilaian Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberikan predikat sehat dengan nilai kredit 81 dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
 - b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat kurang sehat dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

Secara terinci predikat untuk faktor permodalan adalah:

Tabel 3. Predikat Penilaian Faktor Permodalan

Bobot	Rasio	Nilai Kredit Standar	Bobot Nilai Kredit Dalam Faktor	Predikat
(a)	(b)	©	(d=axc)	
25%	8% keatas	81-100	20,25 - 25,00	Sehat
	6,4%-8,00%	65-81	16,25 - 20,25	Kurang Sehat
	dibawah 6,40%	0 -65	0 - 16,25	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

1.11.2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif/Assets Quality (bobot 30%)

1. Penilaian KAP didasarkan pada dua rasio yaitu :

a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif. Bobot 25%

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank. Bobot 5%

2. Aktiva Produktif yang diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sesuai dengan ketentuan dalam Surat keputusan Direksi BI NO.30/17/UPPB tanggal 27 Februari 1998.

3. Rasio Aktiva Produktif Yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif sebagaimana pada ayat 1 huruf a sebesar 15,5%

atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

4. Rasio penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Predikat untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- a. Predikat untuk Komponen Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif. Predikat untuk komponen ini dapat ditentukan seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Predikat Penilaian Komponen rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif.

Bobot Faktor /Standar	Bobot Komp. Dlm. Faktor Per Standar	Rasio	Nilai kredit Standar	Bobot nilai Kredit dalam komponen	Predikat
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=bXd)	
25%	83,33%	Dibawah 3,35%	81-100	67,50-83,33	Sehat
		3,35-5,60%	66-81	55,00-67,50	Cukup Sehat
		5,60-7,85%	51-66	42,50-55,00	Kurang Sehat
		Diatas 7,85 %	0-51	0,00-42,50	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

- b. Predikat untuk Komponen Rasio Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh bank adalah:

Tabel 5. Predikat Komponen Rasio PPAPD Terhadap PPAPWD

Bobot Komp./ Standar	Bobot Komp. Dlm. Faktor/Standar	Rasio (%)	Nilai Kredit standar	Bobot nilai kredit dalam komponen	Predikat
(a)	(b)	(c)	(d)	(e=bxd)	
5%	16,67%	Diatas 81	81-100	13,50-16,67	Sehat
		66-81	66-81	11,00-13,50	Cukup Sehat
		51-66	51-66	8,50-11,00	Kurang Sehat
		Dibawah 51	0-51	0,00-8,50	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

c. Predikat untuk Faktor Aktiva Produktif dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 6. Predikat Penilaian Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Bobot	NilaiKredit Standard	Bobot nilai kredit dalam Faktor	Predikat
(a)	(b)	(c=a x b)	
30%	81-100	24,30-30,00	Sehat
	66-81	19,80-24,30	Cukup Sehat
	51-66	15,30-19,80	Kurang Sehat
	0-51	0-15,30	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

2.11.3. Faktor Manajemen / Management (bobot 25%)

1. Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup dua komponen yaitu manajemen umum dengan bobot 10% dan manajemen risiko dengan bobot 15% yang semuanya dinilai dengan menggunakan daftar pertanyaan (lihat lampiran).
2. Jumlah pertanyaan/pernyataan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi bank Umum Devisa sebanyak 100 pertanyaan (pernyataan).
 - b. Bagi bank Umum Non Devisa sebanyak 85 Pertanyaan (pernyataan).
3. Setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai nilai kredit::

- a. Bagi Bank Umum Devisa sebesar 0,25
 - b. Bagi Bank Umum Non Devisa sebesar 0,294%
4. Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria :
- a. Untuk nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah.
 - b. Nilai 1, 2 dan 3 mencerminkan kondisi antara.
 - c. Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.
5. Predikat untuk komponen manajemen umum adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Predikat Penilaian Komponen Manajemen Umum

Bobot Komp. /Standar	Bobot Komponen Dlm. Faktor	Nilai Kredit Standard	Bobot nilai kredit dalam Faktor	Predikat
	(a)	(b)	(c=a x b)	
10%	40%	81-100	32,40-40,00	Sehat
		66-81	26,40-32,40	Cukup Sehat
		51-66	20,40-26,40	Kurang Sehat
		0-51	0 -20,40	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

6. Predikat atau kriteria untuk komponen Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Predikat Penilaian Komponen Manajemen Risiko

Bobot Komp. / Standar	Bobot Komp. Dlm. Faktor/Standar	Nilai Kredit Standard	Bobot nilai kredit dalam Faktor	Predikat
(a)	(b)	(c)	(d=b x c)	
15%	60%	81-100	48,60-60,00	Sehat
		66-81	39,60-48,60	Cukup Sehat
		51-66	30,60-39,60	Kurang Sehat
		0-51	0- 30,60	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

8. Kriteria atau predikat untuk Faktor Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Predikat Penilaian Faktor Manajemen

Bobot Faktor/Standar	Nilai Kredit Standard	Bobot nilai kredit dalam Faktor	Predikat
(a)	(b)	(c=axb)	
25%	81-100	20,25 - 25,00	Sehat
	66-81	16,50 - 20,25	Cukup Sehat
	51-66	12,75 - 16,50	Kurang Sehat
	0-51	0 - 12,75	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

2.11.4. Faktor Rentabilitas/Earning Power (bobot 10%)

1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio:

- Rasio Laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Bobot 5%
- Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Bobot 5%

9. Predikat untuk komponen Rasio Laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama sebagaimana pada ayat 1 huruf a sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Kriteria secara terinci adalah:

Tabel 10. Predikat penilaian Komponen Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume Usaha

Bobot Komponen /Standar	Bobot Komp. Dlm Faktor Per Standar	Rasio (%)	Nilai Kredit Standar	Nilai Kredit Komponen	Predikat
a	b	c	d	e	f
5%	50%	Diatas 1,22	81 - 100	40,05 - 50,00	Sehat
		0,99 - 1,22	66 - 81	33,00 - 40,05	Cukup Sehat
		0,77 - 0,99	51 - 66	25,50 - 33,50	Kurang Sehat
		Dibawah 0,77	0 - 51	00,00 - 25,50	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

3. Predikat untuk komponen Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Kriteria secara terinci sebagai berikut:

Tabel 11. Predikat Untuk Komponen Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

Bobot Komponen/ Standar	Bobot Komp. Dlm Faktor Per Standar	Rasio (%)	Nilai Kredit Stndar	Nilai Kredit Komponen	Predikat
a	B	c	d	e	f
5%	50%	Dibwh 93,52	81-100	40,05-50,00	Sehat
		93,52-94,72	66-81	33,00-40,05	Cukup Sehat
		94,72-95,92	51-66	25,50-33,50	Kurang Sehat
		Diatas 95,92	0-51	00,00-25,50	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

4. Predikat penilaian untuk Faktor Rentabilitas adalah :

Tabel 12. Predikat Penilaian Faktor Rentabilitas (Earning Power)

Bobot Faktor Per Standar	NilaiKredit standar	Bobot nilai kredit dalam komponen	Predikat
(a)	(c)	(d=axc)	
10%	81-100	8,10 -10,00	Sehat

	66-81	6,60 - 8,10	Cukup Sehat
	51-66	5,10 - 6,60	Kurang Sehat
	0-51	0,00 - 5,10	Tidak Sehat

Sumber: Data Primer, 1998

2.11.5. Faktor Likuiditas (bobot 10%).

1. Penilaian terhadap faktor ini didasarkan pada dua rasio yaitu:
 - a. Rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap aktiva lancar dalam rupiah. Bobot 5%.
 - b. Rasio Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Rasio ini mempunyai bobot 5%.
2. Aktiva lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a adalah meliputi kas, giro BI, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar uang (SBPU) yang telah diendos oleh bank lain.
3. Kredit yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b adalah meliputi:
 - a. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain.
 - b. Penanaman pada bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan.
 - c. Penanaman pada bank lain dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.
4. Dana yang diterima bank sebagaimana dalam ayat 1 huruf b adalah meliputi:
 - a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
 - b. Giro, Deposito dan tabungan masyarakat;

- c. Pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (diluar pinjaman subordinasi);
- d. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan;
- e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
- f. Modal inti dan ;
- g. Modal pinjaman.

5. Komponen Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar seperti pada ayat 1 huruf a sebesar 100% atau lebih diberi nilai 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Kriteria untuk komponen ini adalah:

Tabel 13. Predikat Penilaian Komponen rasio Kewajiban Bersih Call Money Terhadap Aktiva lancar.

Bobot Komp. /Standar	Bobot Komp. Dlm Faktor Per Standar	Rasio (%)	Nilai Kredit Standar	Nilai Kredit Komponen	Predikat
a	b	c	d	e	f
5%	50%	Dibawah 18	81-100	40,05-50,00	Sehat
		18 - 33	66-81	33,00-40,05	Cukup Sehat
		33 - 48	51-66	25,50- 33,50	Kurang Sehat
		Diatas 48	0-51	00,00- 25,50	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

6. Komponen Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap

penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kreditnya ditambah

4 dengan maksimum 100. Kriterianya adalah:

Tabel 14 Predikat Penilaian Komponen Resiko Kredit yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Bobot Komp. / Standar	Bobot Komp. Dlm Faktor Per Standar	Rasio (%)	Nilai Kredit Standar	Nilai Kredit Komponen	Predika:
a	b	c	d	e	f
5%	50%	Dibwh 93,75	81-100	40,05-50,00	Sehat
		93,75-97,50	66-81	33,00- 40,05	Cukup Sehat
		97,50-101,25	51-66	25,50- 33,50	Kurang Sehat
		Diatas 101,25	0-51	00,00- 25,50	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

7. Predikat untuk faktor Likuiditas adalah:

Tabel 15. Predikat Penilaian Faktor Likuiditas Bank

Bobot Faktor Per Standar	NilaiKredit standar	Bobot nilai kredit dalam komponen	Predikat
(a)	(c)	(d=axc)	
10%	81-100	8,10 -10,00	Sehat
	66-81	6,60 - 8,10	Cukup Sehat
	51-66	5,10 - 6,60	Kurang Sehat
	0-51	0,00 - 5,10	Tidak Sehat

Sumber : Data Primer, 1998

2.11.6 Hasil Penilaian

Hasil penilaian tingkat kesehatan bank terhadap masing-masing faktor atau komponen dalam CAMEL dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai kredit 81 -100 kategori sehat

Nilai kredit 66 - 81 Kategori Cukup Sehat

Nilai kredit 51 - 66 kategori Kurang sehat.

Nilai kredit 0 - 51 kategori tidak Sehat.

Kriteria ini tentu sebagai kriteria final sesudah memperhitungkan ketentuan lainnya seperti diungkapkan dimuka.

Faktor-faktor yang dinilai dan bobotnya dapat dilihat pada tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16. Predikat Penilaian Kesehatan Bank Umum

Faktor yang dinilai	Komponen yang dinilai	bobot
1.Modal	Rasio Modal terhadap ATMR	25%
		25 %
2. Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif.	25%
	b. Rasio Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.	5%
		30%
3.Manajemen	a. Manajemen Umum	10%
	b. Manajemen risiko	15%
		25%
4.Rentabilitas	a. Rasio Laba terhadap Rata-rata volume Usaha	5%
	b. Rasio Biaya Operasional Bank TerhadapPendapatan operasional	5%
		10%
5. Likuiditas	a. Rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar.	5%
	b. Rasio Kredit Terhadap Dana yang diterima.	5%
		10%
Total Nilai Kredit		100%

Sumber: Data Primer diolah, 1999

BAB III

DESKRIPSI UMUM BANK BPD JAWA TENGAH

3.1. Deskripsi Berdirinya Bank BPD Jawa Tengah

Bank Pembangunan Jawa Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah no. 6 tahun 1963, tanggal 7 Maret 1963 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah seri S 1963 No. 9 Tanggal 7 April 1963. Landasan Operasionalnya adalah surat persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 Tanggal 12 Maret 1963 dengan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral no. 4/Kep/MUBES/6/63, tanggal 14 Maret 1963 tentang Pemberian ijin untuk melakukan usaha kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Modal dasar bank ditetapkan Rp 100.000.000 dan telah disetor pada tanggal 4 April sebesar Rp 20.000.000. Dengan telah dipenuhinya persyaratan pendirian bank, maka pada tanggal 6 April 1963 diresmikan operasional bank pembangunan Daerah Jawa Tengah. Kantor Pusat BPD Jawa Tengah adalah berkedudukan di Ibu Kota Propinsi yaitu Semarang, tepatnya saat ini di Jl. pemuda no 142 Semarang, serta dapat membuka / mempunyai kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan payment point didalam wilayah kerja Propinsi Jawa tengah sebagai perwujudan branch banking System.

Bentuk Badan Usaha pada mulanya adalah perusahaan daerah namun seiring dengan tuntutan jaman pada akhir tahun 1998 resmi menjadi Perseroran Terbatas dengan Nama PT. Bank BPD Jawa Tengah. PT ini pun semula dimiliki oleh Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat III Jawa Tengah, namun sejak 1999 dengan adanya program rekapitalisasi masuk pemilik baru yaitu Pemerintahan Pusat Republik Indonesia.

3.2. Misi, Tugas dan Fungsi Bank BPD Jawa Tengah

Misi atau sering disebut tugas pokok suatu bank umumnya berbeda-beda. Misi / tugas pokok akan menjadi arah dan pegangan operasinya. Tugas pokok bank adalah tugas utama bank menurut spesialisasinya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang atau dalam akte pendiriannya. Tugas pokok ini biasanya disebut "line of business". Disamping itu termasuk tugas pokok pula adalah semua sektor kegiatan ekonomi yang pada suatu saat merupakan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam perencanaan bank tidak bisa lepas dari tugas pokok / misinya.

Tugas pokok Bank BPD Jawa Tengah adalah a). membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup rakyat, b). membiayai sektor usaha kecil dan menengah. Adapun fungsi Bank BPD Jateng

adalah sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan / perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang.

Untuk mencapai misi tersebut maka bank menjalankan fungsi operasional yaitu :

1. Turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan.
2. Melaksanakan penyimpanan uang daerah.
3. Sebagai pemegang kas daerah.
4. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
5. Sebagai pembina dan pengawas teknis Badan Kredit kecamatan (BKR-BKK) se Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan tugas operasional tersebut maka Bank BPD Jawa Tengah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Membiayai usaha kecil dan menengah untuk menunjang pembangunan di Daerah Jawa Tengah.
2. Memberikan kredit jangka pendek dan jangka panjang.
3. Menghimpun dana dari masyarakat, pemerintah pusat, daerah serta pihak ketiga.
4. Melaksanakan penyertaan dalam modal perusahaan utamanya yang mempunyai nilai strategis tinggi dalam pembangunan.

5. Melakukan pembiayaan prasarana daerah yang dapat mempercepat pembangunan daerah.
6. Bertindak sebagai penjamin (underwriter)
7. Membina dan mengawasi BPR_BKK dalam rangka menggerakkan perekonomian di pedesaan.

3.3. Permodalan

Faktor modal BPD Jawa Tengah telah berkali-kali mendapat perhatian serius dari para pemiliknya guna meningkatkan aktifitas bank tersebut. Modal dasar pada tahun 1994 sebesar Rp 30.000.000, berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah kepada DPRD I Jawa Tengah no. 584/16403, tanggal 17 Maret 1989 tentang usul peningkatan modal Statutair, yang mendapat persetujuan dari DPRD I Jawa Tengah No 03/PAR III/DPRD/89-90 tanggal 26 Juli 1989 sebagai ketentuan tambahan dalam Peraturan Daerah Jawa Propinsi Jawa Tengah no. 10 Tahun 1981. Kemudian pada tahun 1996 modal menjadi Rp 75.000.000 sebagai akibat penambahan dari para pemiliknya.

Ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia sejak 1997, maka Bank BPD Jateng terkena dampaknya, walaupun bisa bertahan. Dampak tersebut terukur pada awal 1999 yaitu lenyapnya modal akibat kerugian yang melampaui jumlah modal yaitu Rp 482.156.323.000. Kerugian tersebut ditutup dengan program rekapitalisasi hingga pada tahun 1999 BPD Jateng memiliki modal 82.350.646 dengan komposisi Pemerintahan Pusat 66,71%;

Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah sebesar 20,74% dan pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah sebesar 12,55%

3.4. Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kemampuan bersaing sebuah bank adalah tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu membaca fenomena-fenomena makro ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat memanfaatkan peluang dan mengeliminir ancaman. Mengingat hal tersebut maka sumber daya manusia yang merupakan assets terpenting pada sebuah bank perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih profesional. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat diberdayakan secara profesional, Bank BPD Jawa Tengah telah melakukan *training* baik oleh BPD sendiri maupun melalui pengiriman SDM ke pelatihan eksternal yaitu ke Institut Bankir Indonesia.

Tahun 1999 Jumlah sumber daya manusia PT Bank BPD Jawa Tengah adalah 2.363 Personal karyawan. Klasifikasi sumber daya manusia tersebut dapat dilihat dari segi pendidikan seperti tampak pada tabel 17.

Tabel 17. Profile SDM Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah (orang)
Pasca Sarjana	14	2	16
Sarjana	406	182	588
Sarjana Muda	346	227	573
SLTA	821	159	980
Lainnya	206	0	206

Sumber : Data Primer diolah, 1999

3.5. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya untuk memuaskan konsumen dan memperlancar kegiatan operasionalnya PT. Bank BPD Jawa Tengah telah memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 kantor pusat, 1 Kantor cabang Utama, 6 kantor cabang koordinator, 26 Cabang yang bertempat pada masing-masing kabupaten dan kota madia di seluruh Jawa Tengah, 85 Kantor Cabang Pembantu dan 64 Kantor Kas. Disamping itu Bank PBD Jawa Tengah telah menggunakan prasarana *Automatic Teller Machine (ATM)* guna menunjang fungsi pemasaran dan distribusi.

3.6. Produk Dan Pelayanan Jasa Bank

PT. Bank BPD jateng merupakan perusahaan jasa keuangan (perbankan) sehingga sebagai lembaga yang berorientasi pada kepuasan nasabah (konsumen) maka selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik (service excelent) misalnya mau menampung setiap keluhan nasabah. Disamping itu BPD Jateng juga selalu melakukan evaluasi produk agar selalu dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Secara terinci produk dan jasa bank di BPD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Produk Dana
 - Tabungan Bima
 - Simpeda
 - Rabungan Haji
 - Tabungan Qurban
 - Bank garansi
 - Rekening Koran

Deposito Berjangka
Serifikat Deposito
Bepede save
Dana Pensiun Lembaga Keuangan

2. Produk Kredit

Kredit R/C
Kredit Berjangka
Kredit Profesi
Kredit Perorangan
Kredit Usaha kecil
Kredit Investasi
KPR
Kredit Koperasi
Kredit SMIEP
Kredit P3KUK
Kredit Bina Usaha tani
Kredit Export
Kredit lain-lain

3. Produk Jasa

Transfer
Inkasso
Payment Point
Safe Deposit Box
Penjualan valas
Dan lain lain

3.7. Taktik, Strategi, Sistem Dan Prosedur

Dalam rangka menghadapi konsisi ekonomi yang belum menentu maka Bank BPD Jawa Tengah perlu melakukan taktik, strategi, pembenahan sistem dan prosedur agar dapat menjaga *competitive advantage* . Langkah-langkah yang telah dan sedang ditempuh adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui hubungan dengan nasabah yang sudah terbina dengan baik.

2. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan serta penataan personal yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan disamping melakukan penerapan sistem *reward* dan *punishment*.
3. Melakukan perbaikan manajemen yang lebih berorientasi pada manajemen persuasif secara demokratis dan transparan
4. Memperbaiki peningkatan permodalan melalui program rekapitalisasi perbankan guna menjaga kecukupan modal bank.
5. Memperbaiki kualitas aktiva produktif dengan berpegang pada *prudential banking*, pembinaan nasabah dan penagihan kredit serta restrukturisasi kredit.
6. Melakukan penetapan suku bunga yang bersaing dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keuntungan bank.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih memadai melalui komputerisasi dan penataan jaringan kantor.
8. Penyaluran kredit diprioritaskan pada kredit program dengan bertumpu pada pengusaha kecil menengah sebagai sasaran utama
9. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional bank.

3.8. Struktur Organisasi Bank BPD Jawa Tengah

Struktur organisasi sebuah bank akan menggambarkan koordinasi antara pimpinan dengan bawahan atau antar fungsi-fungsi. Sistem koordinasi dapat berjalan dengan baik bila diadakan hubungan yang langsung dan terus menerus antara pimpinan dengan bawahan. Koordinasi adalah pengawasan

secara tegas untuk mendorong setiap individu yang tergabung dalam organisasi bank agar dapat bertindak disiplin, dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab sehingga akan tercapai suatu kerja sama yang baik antara pimpinan dengan bawahan atau antara fungsi-fungsi yang ada.

Sukanto Rekso Hadiprojo dan Hani T. Handoko menyebutkan bahwa yang dimaksud struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi mencerminkan mekanisme-mekanisme formal dimana organisasi tersebut dikelola.

Struktur Organisasi PT. Bank BPD Jawa Tengah merupakan organisasi garis dan lini, yaitu bentuk struktur organisasi tertua dan sederhana. Ciri Struktur organisasi ini adalah hanya terdapat satu garis pada tiap-tiap bawahan.

Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan struktur organisasi PT. Bank BPD Jawa Tengah tahun 1997, 1998 dan 1999 maka dapat dikatakan telah terjadi restrukturisasi organisasi. Struktur organisasi yang "gemuk" telah menjadi ramping. Langkah ini dilakukan sebagai tuntutan perubahan Perusda menjadi Perseroan Terbatas serta untuk memenuhi persyaratan program rekapitalisasi.

Restrukturisasi organisasi yang mendasar adalah adanya penghapusan dewan audit dan penasihat. Fungsi utama berupa perencanaan,

pemasaran dan Umum masih dipertahankan, hanya saja Direktur Perencanaan & Pembinaan hanya membawahi satu biro perencanaan yang sebelumnya membawahi dua biro yaitu biro Perencanaan dan biro Pengawasan, Biro Pengawasan dihapus. Direktur Pemasaran membawahi dua biro yaitu Biro pemasaran dan Biro Treasuri. Sementara Direktur Umum membawawahi Biro Umum dan Biro Hukum & SDM. Penghapusan jabatan yang tidak efisien terjadi pada seluruh wakil biro. Disamping itu restrukturisasi organisasi dipengaruhi juga oleh kondisi perbankan. Hal ini tercermin oleh munculnya Internal Audit Team Work yang bertanggung jawab kepada Kabiro Perencanaan dan Pembinaan dan kepada Komisaris, Assets Management Unit Team Work yang bertanggung jawab kepada Direktur utama serta Tim Restrukturisasi Kredit yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Restrukturisasi organisasi juga diikuti oleh oleh mutasi dan penggantian beberapa direktur. Jabatan-jabatan strategis dijabat oleh orang yang tepat, orang memiliki kualifikasi dan ketrampilan di bidang perbankan Hal ini dilakukan agar seluruh jajaran di lingkungan PT Bank BPD Jateng lebih profesional.

Melihat restrukturisasi tersebut sangat tampak bahwa struktur tersebut disesuaikan dengan kondisi perbankan yang sedang menghadapi kredit bermasalah dan inefisiensi. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi dimaksud dapat dilihat pada lampiran 1.

3.1. Tinjauan Umum Profile Aktiva Dan Pasiva Bank BPD Jawa Tengah.

Dalam mengelola dana bank, akan dapat dilihat dari profil aktiva dan pasivanya. Profil aktiva -pasiva bisa mengindikasikan kebijakan , strategi dan orientasi penghimpunan dan penempatan dana.

Penghimpunan dana yang diinginkan bank akan sangat tergantung orientasi bank. Pada saat membutuhkan dana jangka pendek untuk membiayai likuiditas, bank akan lebih suka menghimpun dana jangka pendek. Implementasinya adalah menetapkan tingkat bunga deposito jangka pendek yang lebih tinggi daripada deposito yang berjangka waktu lebih panjang. Sebagai gambaran bisa dibuktikan ketika krisis perbankan memuncak, bunga deposito 1 bulan sebesar 70% sementara yang 3 bulan sebesar 50% pada tahun 1998-1999. Sementara sebelum krisis bisa dibuktikan bahwa tingkat bunga deposito jangka pendek lebih murah daripada deposito jangka panjang (ingat sebelum krisis ekonomi).

Begitu juga pada saat bunga penempatan relatif tinggi, umumnya bank lebih suka menempatkan dana ke kredit atau surat berharga dengan bunga tetap, sementara saat bunga relatif rendah, bank lebih suka menempatkan dana dengan variable rate. Persoalannya ketika suku bunga kredit sangat tinggi (ekstrim) seperti kasus kredit selama krisis hingga mencapai 45%, maka bank menghentikan pemberian kredit sebab terlalu mahal (permintaan kredit jelas menurun), maka bank akan mengalihkan

Investasinya pada surat berharga misalnya berupa SBI atau SPBU sebagai pengamanan terhadap dana.

Tabel 18. Neraca Bank BPD Jawa Tengah Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Uraian	1997 (Rp)	1998 (Rp)	1999 (Rp)
A	Aktiva:			
1	Kas	50.986.426	99.230.267	221.697.272
2	Giro Pada Bank Indonesia	83.915.906	118.516.638	350.374.245
3	Giro Pada Bank Lain	14.194.114	18.700.037	7.331.961
4	Giro Pos	61.329	164	80
5	Penempatan Pada Bank Lain	201.176.950	224.775.208	266.049.259
6	Surat-surat Berharga	23.207.792	33.299.516	386.986.144
7	Kredit yang diberikan	1.198.595.156	1.053.236.114	571.816.646
8	Penyertaan	14.298.884	7.396.200	2.364.897
9	Dana pelunasan Obligasi	79.000.000	75.000.000	
10	Aktiva Tetap	43.049.852	47.790.061	44.337.366
11	Aktiva Sewa Guna Usaha		13.061.496	12.371.036
12	Bangunan Dalam Penyelesaian	11.869.147	7.221.332	7.459.682
13	Aktiva lain-Lain	18.186.657	14.945.211	108.798.479
	Total Aktiva	1.738.542.213	1.713.172.244	1.979.587.068
B	Pasiva Dan Modal :			
1	Giro	376.525.924	416.110.591	677.577.844
2	Kewajiban Segera Dibayar	41.379.511	75.583.922	20.403.592
3	Tabungan	345.300.568	259.001.232	436.137.381
4	Deposito Berjangka	338.066.694	474.763.078	405.204.333
5	Sertifikat Deposito	1.395.200	73.371	25.793
6	Kas Daerah	117.453.441	97.709.930	105.547.500
9	Surat Berharga yang diterbitkan	237.000.000	100.000.000	
10	Pinjaman Yang diterima	161.560.953	173.319.572	214.198.008
11	Hutang Sewa Guna Usaha		11.657.182	11.554.338
12	Kewajiban Lain-Lain	18.883.217	28.425.288	26.587.633
	Jumlah Kewajiban	1.637.565.508	1.636.644.166	1.897.236.422
13	Modal Disetor	56.667.000	58.664.000	583.754.000
14	Modal yang belum ditempatkan	63.477	4.966.414	1.055.651
15	Modal Donasi	224.920	224.920	0
16	Laba Ditahan	44.021.308	12.672.744	(502.459.005)
	Jumlah Modal	100.976.705	76.528.078	82.350.646
	Total Pasiva Dan Modal	1.738.542.213	1.713.172.244	1.979.587.068

Keterangan : Jumlah Aktiva Produktif Disajikan Sebesar Nilai Bersih Setelah Dikurangi Dengan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Sumber : Data Primer, 1999

Tabel 19. Laporan Rugi-Laba Bank BPD Jawa Tengah Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999 (Dalam Ribuan Rupiah)

	Uraian	1997 (Rp)	1998 (Rp)	1999 (Rp)
A	Pendapatan Dan beban Operasional:			
1	Pendapatan Bunga:			
	Bunga Yang Diperoleh	296.366.368	350.189.905	309.493.757
	Provisi dan Komisi	5.825.305	2.537.806	3.015.673
	Jumlah Pendapatan Bunga	302.191.673	352.727.711	312.509.430
2	Beban Bunga	212.933.124	(314.097.866)	(257.704.930)
	Pendapatan Bunga Neto	89.258.549	38.629.845	54.804.500
B	Pendapatan Dan Beban Operasional lainnya:			
1	Pendapatan Lain-lain	32.178.221	195.993.219	168.904.019
2	Beban Overhead			
	Beban Tenaga Kerja	36.559.204	30.916.010	39.008.209
	Beban Penyusutan Aktiva Tetap	5.531.672	6.300.175	5.612.650
	Beban penyisihan Akt. Produktif	14.010.878	14.953.478	463.530.441
	Beban Kantor	13.537.280	12.863.242	12.526.859
	Beban Pemeliharaan	11.572.331	13.668.897	14.164.543
	Beban Lain-lain	18.390.300	174.405.906	172.109.279
	Beban Operasional lainnya Netto	67.423.444	57.114.489	538.047.962
	Laba (Rugi) Operasional Netto	21.835.105	(18.484.644)	(483.243.462)
C	Pendapatan Dan Beban Non Operasional			
1	Pendapatan Non Operasional	2.534.978	4.288.535	2.063.765
2	Beban Non Operasional	3.469.632	(6.106.573)	(976.626)
	Laba (rugi) Non Operasional Netto	(934.654)	(1.818.038)	1.087.139
D	Laba (rugi)			
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	20.900.451	(20.302.682)	(482.156.323)
	Pajak penghasilan (Pph) Badan	6.172.608	0	0
E	Laba Bersih	14.727.843	(20.302.682)	(482.156.323)

Sumber : Data Primer, 1999

Seperti tampak pada tabel 18 bahwa profil aktiva - pasiva bank menunjukkan bahwa Bank BPD Jawa Tengah dalam mengelola aktiva

terkonsentrasi pada pemberian kredit dengan porsi dari total aktiva pada tahun 1997 sebesar Rp 1198.595.156.000 atau 68,94 %, pada tahun 1998 sebesar Rp 1.053.236.114.000 atau 61,48 %, pada tahun 1999 sebesar Rp 571.816.646.000 atau 28,88 % dari total aktiva. Kemudian konsentrasi kedua adalah penempatan pada bank lain yaitu pada tahun 1997 sebesar Rp 201.176.950.000 atau 11,57%, pada tahun 1998 sebesar Rp 224.775.208.000 atau 13,12% dan pada tahun 1999 sebesar Rp 266.049.259.000 atau 13,43% dari total penempatan aktiva bank. Hal yang menarik adalah bank melakukan *change* penempatan aktiva untuk menghindari kerugian ketika penempatan kredit tidak lagi menguntungkan pada tahun 1999 yaitu menggeser sebagian dana untuk ditempatkan pada surat berharga menjadi sebesar Rp 386.986.144.000 atau porsinya menjadi 19,55 %. Padahal tahun 1997 penempatan surat berharga hanya Rp 23.207.792 (1,34%) dan pada tahun 1998 sebesar Rp 33.299.516.000 (porsi 1,94%). Disamping itu Bank BPD Jateng pada tahun 1999 tampak terlalu konservatif dalam memelihara likuiditas. Hal ini terlihat disamping meningkatnya penempatan surat berharga jangka pendek, juga meningkat secara ekstrim pada saldo kas dan saldo giro BI. Ketiga pos tersebut merupakan sumber likuiditas jangka pendek. Sementara untuk pos-pos aktiva yang lain (selain yang disebutkan di sini) selama tahun 1997, 1998 dan 1999 perannya relatif kecil. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penempatan aktiva bank pada tahun 1997 dan 1998 lebih berorientasi pada perolehan

pendapatan operasional daripada likuiditas dan pada tahun 1999 Bank BPD lebih mengutamakan likuiditas.

Pada sisi pasiva Bank BPD Jateng masih mengandalkan dana masyarakat yaitu pada tahun 1997 untuk giro sebesar Rp 376.525.924.000 atau porsi 21,65%, tahun 1998 sebesar Rp 416.110.591.000 (24,28%) dan pada tahun 1999 sebesar Rp 677.577.844.000 (34,23%) dari total pasiva bank. Untuk Tabungan pada tahun 1997 sebesar Rp 345.300.568.000 (19,86%), pada tahun 1998 sebesar Rp 259.001.232.000 (15,13%) dan pada tahun 1999 sebesar Rp 436.137.381.000 (22,03%). Peran yang cukup besar juga terjadi pada deposito yaitu pada tahun 1997 sebesar Rp 338.066.694.000 (9,45%), pada tahun 1998 sebesar Rp 474.763.078.000 (27,71%) dan pada tahun 1999 sebesar Rp 405.204.333.000 (20,47%). Disamping mengandalkan dana masyarakat juga masih bertumpu pada pinjaman diterima dan kas daerah (lihat tabel 18/Neraca). Profil pasiva ini menunjukkan bahwa Bank BPD Jateng masih mengandalkan pendanaan aktiva dari sumber dana berbasis bunga. Oleh karena itu dominasi posisi pendapatan bunga dan biaya bunga masih berlangsung dalam mengelola aktiva & pasiva bank (lihat Tabel 19/Laporan Laba Rugi). Dominasi pendapatan bunga pada tahun 1997 sebesar 89,67%, tahun 1998 sebesar 63,78% dan pada tahun 1999 sebesar 64,64%. Sementara itu dominasi biaya bunga pada tahun 1997 sebesar 67,38%, pada tahun 1998 sebesar 54,79% dan pada tahun 1999 sebesar 26,29%.

Penurunan dominasi biaya bunga pada tahun 1999 sebagai akibat meningkatnya biaya overhead. Biaya overhead tersebut terutama akibat kredit macet / biaya penyisihan penghapusan kredit yang menempati porsi 47, 29% sedangkan sisanya merupakan biaya overhead yang lain.

Konsentrasi penempatan dana dan pendanaannya yang terfokus seperti disebutkan di atas juga membawa konsekuensi pada kondisi likuiditas potensial. Pada tabel 20 terlihat bahwa posisi rekening komitmen dalam Posisi Negatif atau *Short Position* yang berarti akan terjadi pengetatan likuiditas. Namun demikian Bank BPD Jawa Tengah tampaknya memiliki sandaran sumber likuiditas potensial pada rekening kontinjensi yang memiliki posisi positif (*long Position*) relatif besar dengan demikian secara umum likuiditas potensial dari rekening administratif adalah *extra liquidity*. Tentu saja dengan asumsi bahwa kontinjensi tagihan dapat menjelma menjadi tagihan riil pada saatnya.

Tabel 20. Laporan Komitmen Dan Kontinjensi Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999 (Dalam Ribuan Rupiah)

	Uraian	1997 (Rp)	1998 (Rp)	1999 (Rp)
A	Komitmen			
1	Tagihan Komitmen:			
	Fasilitas Pinjaman Yang belum digunakan	23.223.980	15.904.806	32.527.670
2	Kewajiban Komitmen:			
	Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum digunakan	97.501.196	60.801.458	41.551.037
	Komitmen Bersih	(74.277.216)	(44.896.652)	(9.023.367)
B	Kontinjensi			
1	Tagihan Kontinjensi:			
	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian (bunga kredit yang diberikan)	14.977.224	62.004.746	12.925.086
	Saldo Kredit yang telah dihapusbukukan	81.957.136	79.548.293	754.801.478
	Inkasso Dalam Penyelesaian	5.924.995	517.662	344.159
	Jumlah tagihan Kontinjensi	102.859.355	142.070.701	768.070.723
2	Kewajiban Kontinjensi:			
	Jaminan Yang diberikan (garansi bank yang belum jatuh tempo)	36.800.534	37.638.320	75.411.828
	Jumlah Kontinjensi Bersih	66.058.821	104.432.381	692.658.895

Sumber : Data Primer 1999

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Krisis Ekonomi dan moneter yang melanda negeri ini sejak 1997 sungguh sangat dasyat sehingga berdampak pada aspek non ekonomi dan moneter. Krisis telah berkembang menjadi multi dimensi. Gejala politik, sosial, ancaman disintegrasi bangsa, kepercayaan dan sebagainya tak terkecuali pada industri perbankan.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat rentan terhadap setiap perubahan, sehingga bisa dipastikan bahwa krisis ekonomi dan moneter pun berdampak pada industri perbankan di Indonesia. Dampak itu bisa tampak pada timbulnya kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Kondisi perbankan yang sangat buruk juga telah menciptakan pengangguran sebagai akibat PHK. Tingkat pengangguran yang tinggi pada gilirannya akan menimbulkan kerawanan sosial.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang strategis yaitu berupa pengendalian inflansi, mengupayakan stabilitas nilai tukar dan memulihkan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Untuk memulihkan kepercayaan terhadap dunia perbankan, pemerintah telah melakukan langkah awal berupa likuidasi terhadap bank-bank yang tidak sehat, melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat, melakukan perubahan UU No 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan dengan UU no 10 Tahun 1998 dan melakukan rekapitalisasi terhadap modal bank. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut diharapkan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap pemulihan dunia perbankan nasional.

Program rekapitalisasi merupakan program penyuntikan modal agar bank dapat berfungsi atau menjalankan aktivitasnya secara sehat. Program ini mengarahkan bank agar beroperasi dengan modal minimum atau CAR sebesar 4% untuk Bank Umum Nasional, sementara Bank Umum Regional atau Bank Pembangunan Daerah diarahkan untuk mencapai CAR 8%.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan salah satu bank yang terpengaruh oleh krisis moneter. Oleh karena itu kinerja BPD Jateng juga secara hipotesis dapat dikatakan sangat memprihatinkan dalam kurun waktu 1997 hingga 1999. Hal ini terbukti bahwa berdasarkan PP No. 35 Tahun 1998 Bank BPD Jawa Tengah Masuk dalam program Rekalitalisasi. Oleh karena itu analisis terhadap rekapitalisasi dan kesehatan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan kebutuhan bagi manajemen, Pemda I dan Tingkat II di Jateng dan masyarakat pada umumnya.

Analisis terhadap permodalan Bank BPD Jawa Tengah dimulai dari langkah untuk mengevaluasi pertumbuhan modal intern. Hal ini diperlukan sebab setiap badan usaha akan selalu berusaha

untuk meningkatkan modalnya dari hasil operasi yang dicapai. Artinya dengan pertumbuhan modal intern, bank tersebut telah mengutamakan pemenuhan modal dari dalam daripada modal dari pihak luar. Suatu pemenuhan kebutuhan modal dari dalam yang cukup akan dapat mempertahankan struktur kepemilikan, sebaliknya apabila modal dari dalam tidak bisa diharapkan sementara kebutuhan modal diperlukan untuk mengimbangi perkembangan usaha maka akan mengundang pemodal dari luar dan ini akan memiliki dampak pada struktur modal. Untuk itu analisis ini dimulai dari analisis pertumbuhan modal intern, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi capital gap. Capital gap adalah kesenjangan modal akibat perkembangan usaha, leverage ratio dan kondisi pertumbuhan modal intern. Dengan program rekapitalisasi diharapkan dapat menutup capital gap. Semua itu akan dianalisis pada bagian berikut:

4.1. Analisis Pertumbuhan Modal Intern, Rekapitalisasi Dan Capital Adequacy Ratio

Untuk menganalisis pertumbuhan modal intern diperlukan data mengenai neraca, laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Data Neraca diperlukan untuk mengetahui total aktiva dan total modal pada tahun yang bersangkutan, Laporan laba rugi untuk mengetahui laba atau rugi setelah pajak dan untuk laporan laba ditahan untuk mengetahui kebijakan deviden dan retention. Selanjutnya untuk

menentukan Internal Capital Generation Rate (ICGR) digunakan rumus atau perkalian sebagai berikut:

$$\text{ICGR} = \text{Leverage ratio} \times \text{Return On Assets} \times \text{Retention ratio.}$$

Leverage ratio adalah perbandingan antara total assets dengan total modal, ROA adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total assets, dan untuk *retention ratio* adalah perbandingan antara laba bersih yang tidak dibagi dengan total laba bersih setelah pajak. Untuk lebih jelasnya berikut ringkasan data dan perhitungannya:

Tabel 21. Data Dan Perhitungan Pertumbuhan Modal Intern Tahun 1997, 1998, dan 1999 (Dalam Rp 000).

Keterangan	Tahun 1997	Tahun 1998	Tahun 1999
1. Total Assets	1.738.542.213	1.713.172.244	1.979.587.068
2. Total Modal	100.976.705	76.528.078	82.350.618
3. Laba Setelah Pajak	14.727.843	(20.302.682)	(482.156.323)
4. Total Laba	14.727.843	(20.302.682)	(482.156.323)
5. Laba Dibagi (Deviden dll)	11.760.040	14.727.843	0
Perhitungan:			
A. Leverage ratio	17,22 X	22,39 X	24,03 X
B. Return On Assets Ratio	0,85%	- 1,19%	- 24,36%
C. Earning Retention Ratio	20,15%	172,54%	100 %
D. ICGR	2,95%	- 45,97%	- 585,37%

Sumber Data : Data Primer, 1999

Dengan melihat perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Modal Internal (Internal Capital Generation Rate) Bank BPD Jawa Tengah selama Tahun 1997 hingga 1999 sangat buruk. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 1997 sebesar 2,95% kemudian pertumbuhannya pada tahun 1998 adalah minus 45,97% dan pada tahun

1999 sebesar minus 585,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank dalam dua tahun terakhir mengalami kerugian dan adanya pengurangan modal bank. Memang diakui bahwa posisi modal semakin efisien yang terlihat dari *leverage rasionya* yang semakin besar. Leverage Ratio yang semakin besar menunjukkan semakin kecil modal yang diberdayakan bank untuk membiayai operasinya. Dengan demikian risiko modal juga semakin besar. Pembiayaan operasi bank dan pembiayaan aktiva bank tampaknya lebih banyak dibelanjai dari sumber dana pihak luar (dana masyarakat). Porsi dana masyarakat mendominasi pasiva bank seperti tampak pada tabel tersebut. Di sisi lain penempatan dana juga terfokus pada penempatan kredit yang memiliki risiko sangat besar. Dengan demikian terkurasnya modal atau adanya kerugian juga sebagai akibat kerugian kredit macet.

Kondisi *leverage ratio* dan perkembangan aktiva bank akan mempengaruhi besarnya *capital gap*. Semakin besar perkembangan aktiva yang dikuasai maka semakin besar kebutuhan modal tambahan suatu bank agar dapat mempertahankan *leverage rasionya*. Analisis ini lebih menitik beratkan pada pendekatan manajerial bank daripada memenuhi regulasi otoritas moneter. Oleh karena itu kebijakan *leverage ratio* umumnya ditentukan oleh Bank yang bersangkutan. Untuk mengevaluasi kebutuhan modal tambahan agar bisa beroperasi secara sehat adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Pertumbuhan Modal Intern Dalam Rupiah (Dalam Rp 000)

Keterangan	Tahun 1997	Tahun 1998	Tahun 1999
1. Total Assets	1.738.542.213	1.713.172.244	1.979.587.068
2. Modal Per 1 Januari	81.231.735	100.976.705	76.528.078
3. Leverage ratio	17,22 X	22,39 X	24,03 X
4. ICGR	2,95%	- 45,97%	- 585,37%
5. Pertumb. Modal Intern (dalam Rupiah)	2.396.336	-46.418.991	-447.972.410

Keterangan : Pertumbuhan Modal Intern dalam Rupiah adalah Modal Awal dikalikan ICGR.

Sumber : Data Primer, 1999

Dengan dasar informasi tersebut maka dapat ditentukan capital gap-nya yaitu :

Tahun 1997

$$\begin{aligned}\text{Capital Gap} &= (1.738.542.213 / 17,22) - (81.231.735 + 2.396.336) \\ &= 17.332.569\end{aligned}$$

Tahun 1998

$$\begin{aligned}\text{Capital Gap} &= (1.713.172.244 / 22,39) - (100.976.705 - 46.418.991) \\ &= 21.957.348.\end{aligned}$$

Tahun 1999

$$\begin{aligned}\text{Capital Gap} &= (1.979.587.068 / 24,03) - (76.528.078 - 447.972.410) \\ &= 453.824.152.\end{aligned}$$

Dengan dasar perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 1997 dengan *leverage ratio* sebesar 17,22 X agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan assetsnya diperlukan tambahan modal sebesar Rp 17.332.569.000.000 , kemudian pada tahun 1998 agar bisa menyesuaikan perkembangan assetsnya diperlukan tambahan

modal sebesar Rp 21.957.348.000.000. Kemudian pada tahun 1999 Bank BPD Jawa Tengah dengan toleransi *leverage ratio* sebesar 24,03X dan agar dapat menyesuaikan perkembangan *assets*-nya perlu adanya penambahan modal untuk menutup capital gap sebesar Rp 453.824.152.000.000.

Program rekapitalisasi akan memberikan kondisi permodalan yang sehat kalau mampu menutup capital gap dan memberikan CAR di atas 8%. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 1998 bahwa Bank BPD Jawa Tengah masuk dalam program rekapitalisasi dan dari Neraca per 31 Desember 1998 modal disetor sebanyak 58.664 lembar Saham a Rp 1.000.000 atau sebesar jumlah nominal Rp 58.664.000.000. Kemudian pada Tahun 1999 jumlah modal disetor menjadi 583.754 lembar saham atau sebesar Rp 583.754.000.000. Dengan demikian telah terjadi penambahan modal (rekapitalisasi) sebesar Rp 525.090.000.000. Dana rekapitalisasi tersebut berasal dari Pemerintah daerah Tingkat I sebesar Rp 85.167.000.000 dan daerah Tingkat II sebesar Rp 50.501.000.000 dan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 389.422.000.000. Program Rekapitalisasi ini dilaksanakan sejak Maret 1999. Bila dilihat dari kebutuhan untuk menutup capital gap sebesar Rp 453.824.153.000.000, sementara rekapitalisasi perbankan di BPD Jawa Tengah telah dilaksanakan sebesar Rp 525.090.000.000 dengan demikian rekapitalisasi perbankan tersebut telah mampu menutup

capital gap bahkan melebihi, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa permodalan Bank BPD Jawa Tengah telah beroperasi secara sehat. Sebagai indikator kesehatan modal bisa dilihat dari kondisi CAR bank tersebut.

Tabel 23. Dana Rekapitalisasi dan Struktur Modal Pasca Rekapitalisasi

Keterangan	Lembar Saham	Nominal Per Lb. (Rp)	Jumlah Modal Disetor (Rp).
Per 31 /12-1999	583.754	1.000.000	583.754.000.000
Per 31/12-1998	58.644	1.000.000	58.664.000.000
Rekapitalisasi			525.090.000.000
Struktur 31/12-99			
Pem. Pusat			389.422.000.000
Pemda Tingkat I			85.167.000.000
Pemda Tingkat II			50.501.000.000

Sumber: Data Primer diolah, 1999

Tabel 24. Tingkat Capital Adiquacy Ratio BPD Jateng Per 31 Desember 1997, 1998 Dan 1999

Keterangan	1997	1998	1999
CAR	10,40%	9,67%	15,33%

Sumber Data : Data Primer Hasil Audit, 1999

Posisi CAR Bank BPD Jawa Tengah pada tahun 1997 sebesar 10,40%, kemudian pada tahun 1998 sebesar 9, 67% dan pada tahun 1999 sebesar 15,33%. Data ini merupakan hasil audit Akuntan Publik (dalam hal ini peneliti tidak menghitung CAR sendiri). Secara umum Bank BPD Jawa Tengah telah beroperasi pada tingkat modal yang lebih dari cukup sebab CAR nya melebihi 8%. Tapi yang perlu

diingat bahwa periode 1999 merupakan hasil rekapitalisasi perbankan. Menurut Uji tuntas (*due Diligence*) pada april 1999 ditemukan kondisi CAR sebesar -28,5% . Ini berarti awal tahun 1999 hingga sebelum rekapitalisasi kondisi permodalan bank BPD adalah sangat mengenaskan. Artinya telah beroperasi dengan dana masyarakat dan pihak lain saja. Perbedaan temuan tim audit dengan tim uji tuntas sebenarnya akibat *timing* kolektibilitas kredit bermasalah yang pada saat hasil audit oleh akuntan publik kredit tersebut belum masuk dalam kolektibilitas macet (kolbi V), sementara ketika tim uji tuntas melakukan *due diligence* bahwa sebagian besar penempatan kredit telah menjadi kredit bermasalah/macet yang harus diserahkan kepada Assets Management Unit (AMU) di BPPN. Memburuknya kolektibilitas ini mewajibkan Bank BPD Jawa Tengah harus membentuk Penyisihan penghapusan Kredit sebesar Rp 463.530.000.000 (lihat laporan keuangan tahun 1999) dan Penyisihan ini jelas merupakan biaya kerugian bagi BPD Jawa Tengah yang dibukukan tahun 1999 dan ini mempengaruhi CAR.

Penilaian kesehatan modal bank didasarkan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resio atau yang disebut Capital Adiquacy ratio. Dalam hal data CAR, peneliti mendasarkan pada data hasil audit akuntan publik untuk periode 1997, 1998 dan 1999. Dengan diketahuinya CAR maka kita dapat menilai yaitu :

- a. Penilaian CAR atau Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum (KPM) sebesar minimum 8% diberikan predikat sehat dengan nilai kredit 81 dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPM sebesar 8% nilai kreditnya ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Pemenuhan KPM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberikan predikat kurang sehat dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka selanjutnya kesehatan modal Bank BPD Jawa Tengah dapat ditentukan seperti tampak pada tabel 25

Tabel 25 . Penilaian Kesehatan Modal bank

Keterangan	1997	1998	1999
1. Capital Adiquacy Ratio	10,40%	9,67%	15,33%
2. Nilai	100	100	100
3. Bobot Komponen/Standar	25%	25%	25%
4. Bobot Komponen Dalam Faktor Per Standar	100%	100%	100%
5. Nilai Kredit Komponen (No. 2 X No. 4)	100	100	100
6. Bobot Faktor/Standar	25%	25%	25%
7. Nilai Kredit Faktor (No. 5 X No. 6)	25	25	25

Sumber : Data Primer diolah, 1998

Hasil penilaian menunjukkan pada tahun 1997 nilai kredit faktor sebesar 25, pada tahun 1998 sebesar 25 dan pada tahun 1999 juga sebesar 25. Dengan demikian secara umum kondisi modal Bank BPD Jawa Tengah adalah sehat. Sebagai catatan bahwa kondisi modal pada tahun 1999 merupakan hasil rekapitalisasi yang sebelumnya rasil

due diligence per April 1999 menunjukkan CAR sebesar -28,5% atau bernilai kredit nol (tidak sehat).

4.2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah aktiva yang ditempatkan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan operasional. Bentuk aktiva ini adalah berupa penempatan pada bank lain, penempatan Surat Berharga, Kredit Yang diberikan dan penyertaan. Dalam operasional bank, aktiva ini umumnya mendominasi aktiva bank sebab dari aktiva ini bank dapat memperoleh sumber pendapatan yang relatif besar. Tentu saja kalau aktiva tersebut berkualitas. Dalam hal aktiva tidak berkualitas misalnya dalam kolektibilitas II, III bahkan IV maka kemungkinan memperoleh pendapatan semakin kecil. Untuk itu sudah menjadi tugas bank agar selalu dapat memelihara kualitas aktiva produktifnya.

Profile aktiva produktif dapat dijelaskan dari komposisi maupun perkembangannya seperti tampak pada tabel 26.

Tabel 26. Porsi dan Perkembangan Aktiva Produktif

Keterangan	Komposisi 1997		Komposisi 1998		Komposisi 1999		Perkembang.	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	1998	1999
A. Aktiva Produktif:								
Penemp Pd Bank Lain	202.187.888	13,85	225.338.554	16,79	267.817.500	20,81	11,45	18,85
Surat-surat Berharga	33.324.414	1,59	33.382.973	2,48	390.422.000	30,05	43,12	1089,52
Kredit yang diberikan	1.219.045.004	83,56	1.075.673.583	80,17	635.889.191	48,94	-11,78	-40,89
Penyertaan	14.370.738	1,00	7.414.737	0,56	5.212.981	0,40	-50,30	-29,69
Total Aktiva Produktif	1.458.928.045	100	1.341.809.847	100	1.299.341.672	100	-8,02	-3,18
B. Total APD*	78.782.114		135.268.499		41.578.934			

Sumber : Data Primer, 1999

* Data Primer Diolah, 1999

Keterangan: APD = Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan

APD = Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan

Dengan dasar tabel 26 dapat dikatakan bahwa Bank BPD Jawa Tengah dalam menempatkan dana pada aktiva produktifnya terfokus pada kredit yang diberikan. hal ini ditunjukkan porsi atau komposisi aktiva produktif pada tahun 1997 sebesar 83,56% merupakan kredit yang diberikan, kemudian pada tahun 1998 sebesar 80% dan pada tahun 1999 sebesar 48,94%. Porsi untuk kredit memang cenderung menurun dan bila dilihat perkembangannya untuk kredit adalah pada tahun 1998 menurun sebesar 11,76% dan pada tahun 1999 menurun lagi sebesar 40,89%. Menurunnya porsi penempatan kredit bukan semata disebabkan oleh penghentian sementara pemberian kredit, namun adanya penghapusan kredit (hasil Due Diligence) yang cukup besar yang diserahkan ke BBPN. Hal yang menarik untuk disimak adalah komposisi Aktiva Produktif pada tahun 1999 yang telah bergeser dari orientasi kredit ke Surat berharga dan penempatan pada bank lain. Porsi untuk Surat Berharga sebesar 30,05% dan penempatan pada bank lain 20,61%. Perkembangan penempatan dana yang sangat ekstrim adalah pada surat berharga yaitu hingga mencapai 43,12% pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 sebesar 1069,52 %. Kondisi ini sangat logis sebab pada tahun 1999 pemerintah telah melakukan pengetatan moneter dengan mematok bunga dana masyarakat yang sangat tinggi hingga mencapai 70%. Dalam kondisi seperti ini alternatif

penempatan dana untuk menghindari kerugian yang paling minimal adalah penempatan pada surat berharga (SBI atau SBPU). Disamping itu secara teoritis pada saat kondisi uang ketat bahwa tingkat bunga Pasar uang Antar Bank Lebih tinggi dari suku bunga kredit. Dengan demikian Bank BPD Jawa Tengah dilihat dari strategi aktiva-pasiva bank telah melakukan *change* yang tepat.

Persoalannya adalah tentang kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank seperti profile diatas. Kualitas Aktiva produktif dalam hal ini akan dilihat dalam tahunan (per 31 Desember) dengan demikian hasil penilaian ini merupakan penilaian pasca rekapitalisasi (khusus tahun 1999). Pada tahun 1999 telah terjadi penghapusbukuan kredit (masuk Assets management Unit, BPPN), dengan demikian Aktiva preuaktif khusus tahun 1999 merupakan aktiva produktif sebesar nilai bruto yang *on balance sheet*.

Kualitas aktiva produktif akan dapat dilihat dari komponen (rasio) Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif dan rasio Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAPD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang wajib Dibentuk (PPAPWD). Aktiva Produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan

kerugian bagi bank. Untuk perhitungan hal tersebut diperlukan data yang terkait.

Tabel 27. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk Dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk. (dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	1997	1998	1999
#PPAPD Untuk :			
1. Penemp. Pd. Bank Lain	1.010.939	563.346	1.768.241
2. Surat Berharga	116.622	83.457	2.435.856
3. Kredit Yang Diberikan	20.449.848	22.437.469	64.072.545
4. Penyertaan	71.854	18.537	2.848.084
Total PPAPD	21.649.263	23.102.809	71.124.726
#PPAPWD	24.566.408	29.102.244	73.224.440

Sumber : Data Primer

##: Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 28. Perhitungan Rasio Untuk Kualitas Aktiva Produktif (data dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	1997	1998	1999
1. Total Aktiva Produktif	1.458.928.045	1.341.809.847	1.299.341.672
2. Total APD	78.782.114	135.268.499	41.578.934
3. Total PPAPD	21.649.263	23.102.809	71.124.726
4. Total PPAPWD	24.566.408	29.102.244	73.224.440
a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan Terhadap Total Aktiva Produktif	5,8%	10,08%	3,1%
b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh bank (PPAPD) Terhadap Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)	88,13%	79,38%	97,13%

Sumber : Data Primer diolah, 1999

Berdasarkan tabel 28 di atas dapat dijelaskan bahwa aktiva produktif pada tahun 1997 sangat baik yaitu dengan rasio 5,6% dan

88,13%, sementara pada tahun 1998 kualitasnya tampak menurun hal ini terlihat dari meningkatnya rasio pertama menjadi sebesar 10,08% sementara rasio yang kedua menurun menjadi 79,38%. Hal yang nampaknya sangat bagus pada tahun 1999 pada kualitas aktiva produktifnya yang tercermin dari menurunnya rasio pertama dan meningkatnya rasio kedua. Kondisi ini bisa dicapai akibat kredit yang dalam keelektibilitas IV telah dihapusbukuan dan masuk dalam BPPN.

Kondisi baik atau buruk dalam konteks diatas harus dinilai dengan *reward system* untuk membuktikan kualitas kesehatannya. Untuk kepentingan ini berikut dapat dilihat pada tabel penilaian kualitas aktiva produktif seperti pada tabel 29.

Tabel 29. Penilaian Kesehatan Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Keterangan Komponen	1997		1998		1999	
	a	b	a	b	a	b
1. Rasio KAP	5,60	88,13	10,08	79,38	3,10	97,13
2. Nilai $(15,5-a)/0,15 : (b \times 1Nk)$	66,00	88,13	36,67	79,38	82,66	97,13
3. Bobot Komponen Per standar	0,25	0,05	0,25	0,05	0,25	0,05
4. Bbt Komp. Dlm faktor/ Standar	0,83	0,17	0,83	0,17	0,83	0,17
5. Nilai Kdt. Komp. $(no.2 \times No.4)$	54,78	14,98	30,44	13,49	68,61	16,51
6. Bobot faktor Per standar	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
7. Nilai Kredit faktor $(No.5a + 5b) \times No. 6$	20,93		13,18		25,54	

Sumber : Data Primer diolah, 1999

Hasil penilaian menunjukkan nilai kredit untuk komponen a atau rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif pada tahun 1997 sebesar 54,78 (cukup sehat), tahun 1998 sebesar 30,44 (tidak sehat) dan pada tahun 1999 sebesar 68,61 (sehat). Sedangkan untuk komponen b atau rasio penyisihan

penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib dibentuk menunjukkan nilai kredit pada tahun 1997 sebesar 14,98 (sehat), pada tahun 1998 sebesar 13,49 (cukup sehat) dan pada tahun 1999 sebesar 16,51. Penilaian ini hanya per komponen, dalam hal menilai faktor Kualitas Aktiva Produktif maka dapat ditunjukkan yaitu nilai kredit pada tahun 1997 sebesar 20,93, pada tahun 1998 sebesar 13,18 dan pada tahun 1999 sebesar 25,54. Dengan demikian kondisi atau kualitas Aktiva Produktif pada tahun 1997 adalah cukup sehat, pada tahun 1998 tidak sehat dan pada tahun 1999 berpredikat sehat.

4.3. Faktor Manajemen

Faktor ini lebih bersifat kualitatif menyangkut manajemen umum dan manajemen risiko. Dalam manajemen umum dimaksudkan untuk mengetahui kinerja bank dari strategi, struktur organisasi, sistem, kondisi Sumber Daya manusia dan aspek kepemimpinannya dalam bank tersebut. Strategi bank yang dimiliki akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan bank. Strategi ini umumnya tercatat dalam rencana kerja bank dalam 5 tahunan dan 1 tahunan. Bank akan dilihat dari implementasi rencana kerja dan strateginya dalam menyesuaikan kondisi pasar, baik peluang, tantangan, kelemahan dan keunggulan bank. Di pihak lain, bahwa pelaksanaan aktivitas bank harus dilaksanakan oleh orang yang tepat pada jobnya Kualifikasi jabatan

strategis harus dijabat oleh orang yang memadai dan setiap wewenang dan tanggung jawab dilakukan secara berjenjang. Kondisi ini harus didukung oleh sistem dan prosedur secara tertulis agar setiap operasional bank dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara itu penerimaan pegawai harus bersifat obyektif agar diperoleh SDM yang memenuhi kualifikasi. SDM tersebut harus dikembangkan melalui pelatihan, jenjang karir harus jelas dan penilaian juga harus obyektif serta pengajuannya juga harus terbuka. Dengan demikian diharapkan para pekerja termotivasi untuk meraih prestasi. SDM yang baik tersebut harus didukung oleh kepemimpinan yang dilandasi semangat untuk mentaati ketentuan tanpa rekayasa, memiliki pengetahuan perbankan yang memadai dan para pimpinan bank harus bekerja secara efektif dan efisien serta diwajibkan menyajikan kinerjanya secara terbuka. Dengan demikian diharapkan akan terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan secara baik yang pada gilirannya akan menciptakan komitmen karyawan dan pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Penilaian manajemen umum ini didasarkan pada 40 pernyataan/pertanyaan yang dapat dilihat pada lampiran 5

Disamping manajemen umum, kinerja bank juga dilihat dari manajemen risiko. Dalam hal ini meliputi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik & pengurus. Kiranya bisa dipahami bahwa bank harus mampu

mengantisipasi risiko likuiditas kaitannya dengan kesenjangan dana maupun *maturity gap*. Bank harus memonitor hal ini sembari memelihara cadangan sekunder guna menopang kemungkinan risiko likuiditas. Tentu saja kepentingan likuiditas tidak boleh mengorbankan kepentingan rentabilitas. Agar rentabilitas tidak terabaikan, bank perlu mengevaluasi perkembangan bunga pasar, harga sekuritas dan mengevaluasi kualitas portofolio aktiva produktifnya. Evaluasi aktiva produktif yang utama adalah pada penempatan kredit. Artinya manajemen bank harus menempatkan kredit sesuai dengan prosedur tertulis dan telah melalui analisis kredit yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank. Tindakan antisipatif dan analisis harus memastikan bahwa secara yuridis bank terlindungi dari risiko hukum. Semua itu bisa dilakukan kalau bank dikelola oleh manajemen yang profesional. Pemilik menyerahkan operasionalnya pada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola bank. Untuk menilai seluruh komponen manajemen risiko bagi Bank Umum Devisa digunakan 60 pertanyaan ataupun pernyataan terlampir pada lampiran 5.

Penilaian faktor manajemen didasarkan pada dua komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar pernyataan. Untuk Bank Umum Devisa (Bank BPD Jawa Tengah) digunakan 100 pernyataan / pertanyaan dan setiap pernyataan / pertanyaan memiliki nilai 0,25.

Skala penilaian setiap pernyataan adalah 0 sampai dengan 4.

- a. Untuk Kondisi lemah nilai 0
- b. Kondisi antara adalah 1,2 dan 3
- c. Kondisi Baik adalah 4

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kondisi manajemen umum pada tahun 1997 sebesar 146, pada tahun 1998 sebesar 146 dan tahun 1999 sebesar 150. Untuk manajemen risiko tahun 1997 nilai kondisi sebesar 218, tahun 1998 sebesar 218 dan pada tahun 1999 sebesar 230. (lihat lampiran 5). Dengan demikian penilaian terhadap faktor manajemen dapat dilakukan sebagai berikut (tabel. 30):

Tabel 30. Penilaian Faktor Manajemen Bank BPD Jawa Tengah.

Keterangan	1997		1998		1999	
	a	b	a	b	a	b
1. Komponen						
2. Jumlah Pernyataan	40	60	40	60	40	60
3. Nilai Kondisi =						
$\Sigma (\text{No.2} \times \text{Nilai Kondisi ke } i)$	146	218	146	218	150	230
4. Nilai Kredit Komponen (No. 3 x 0,25)	36,50	54,50	36,50	54,50	37,50	57,50
8. Bobot Faktor Per Standar	0,25		0,25		0,25	
5. Nilai Kredit Faktor (No.4a + 4b) x No. 8	22,75		22,75		23,75	

Sumber : Data Primer, 1999

Hasil penilaian menunjukkan nilai kredit untuk komponen manajemen umum pada tahun 1997 sebesar 36,50, pada tahun 1998 sebesar 36,50 kemudian pada tahun 1999 sebesar 37,50 sehingga secara umum komponen ini dalam kondisi sehat sebab berada pada nilai kredit antara 32,50 - 40. Sedangkan untuk komponen manajemen risiko pada tahun 1997 memiliki nilai kredit sebesar 54,50, pada tahun 1998 sebesar 54,50 dan pada tahun 1999 sebesar 57,50, sehingga kondisi

manajemen risiko juga sehat sebab berada pada nilai kredit antara 48,60 - 60. Dengan memperhatikan penilaian komponen tersebut maka selanjutnya dapat ditentukan nilai kredit penilaian untuk faktor manajemen, yaitu untuk tahun 1997 memiliki nilai kredit 22,75, pada tahun 1998 sebesar 22,75 dan pada tahun 1999 sebesar 23,75. Dengan demikian secara umum faktor manajemen dalam kondisi sehat sebab berada pada nilai kredit faktor antara 20,25 - 25.

4.4. Faktor Rentabilitas

Dalam menganalisis faktor rentabilitas digunakan dua rasio rentabilitas yaitu Return On Assets dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Namun perlu diketahui bahwa dalam dunia perbankan kita dapat mendeteksi pendapatan utama/operasional bank dan beban utama atau beban operasional. hal ini dimaksudkan untuk mengetahui peran masing-masing pendapatan terhadap jumlah pendapatan bank dan peran masing-masing jenis biaya terhadap total biaya yang pada akhirnya kita dapat menentukan faktor-faktor yang menimbulkan laba atau rugi suatu bank.

Tabel 31. Komposisi Pendapatan Bank Dan Perkembangannya.

Keterangan	Komposisi 1997		Komposisi 1998		Komposisi 1999		Perkembangan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%	%
Pendapatan Bunga	302.191.673	89,67	352.727.711	63,78	312.509.430	64,64	16,72	-11,40
Pendapatan Lain-lain	32.178.221	9,58	195.993.219	35,44	168.904.019	34,94	509,09	-13,82
Pendapatan Non Operasional	2.534.978	0,75	4.288.535	0,78	2.063.765	0,42	69,17	-51,88
Jumlah Pendapatan	336.904.872	100	553.009.465	100	483.477.214	100	64,14	-13,57

Sumber : Data Primer, 1999

Seperti tampak pada tabel 31 dibawah ini bahwa peran pendapatan bunga masih mendominasi pendapatan bank, sementara peran pendapatan operasional lainnya masih relatif kecil. Porsi pendapatan bunga pada tahun 1997 sebesar 89,67%, pada tahun 1998 sebesar 63,78% dan pada tahun 1999 sebesar 64,64%. Berdasarkan informasi tersebut dapat dikatakan bahwa bank masih mengandalkan pendapatan dari penempatan kredit atau paling sedikit pada surat berharga. Sementara perkembangan pendapatan bunga pada tahun 1998 sebesar 16,72% dan pada tahun 1999 menurun menjadi sebesar - 11,64%. Penurunan ini sebagai akibat pergeseran penempatan dana dari penempatan kredit ke penempatan dana berupa surat berharga. Seperti kita ketahui bahwa rate untuk surat berharga adalah lebih rendah daripada rate untuk kredit, namun surat berharga lebih likuid. Sedangkan untuk pendapatan bunga neto yang diperoleh bank masih menunjukkan positif (lihat tabel 32), artinya pengelolaan aktiva yang berbasis bunga masih pada base lending rate diatas biaya dana (Cost Of Fund).

Tabel 32. Pendapatan Bunga Neto

Keterangan	1997	1998	1999
Jumlah Pendapatan Bunga	302.191.673	352.727.711	312.509.430
Beban Bunga	212.933.124	314.097.866	257.704.930
Pendapatan Bunga Neto	89.258.549	38.629.845	54.804.500

Sumber : Data Primer, 1999

Sementara itu dilihat dari perkembangan dan komposisi/peran atau porsi biaya yang timbul di bank BPD Jawa Tengah, maka dapat dikatakan bahwa peran biaya bunga tetap masih dominan yaitu pada

tahun 1997 sebesar 67,38%, pada tahun 1998 sebesar 54,79% dan pada tahun 1999 sebesar 47,51% atau rata-rata 56,56%. Sementara untuk beban penghapusan aktiva produktif mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun 1999. Porsi biaya penghapusan aktiva produktif pada tahun 1997 sebesar 4,43% pada tahun 1998 sebesar 2,61% dan pada tahun 1999 sebesar 47,29%, Porsi biaya ini meningkat secara tajam pada tahun 1999 yaitu sebesar 2999,82% yang sebelumnya pada tahun 1998 hanya meningkat sebesar 6,73%. Hal ini bila dikaitkan dengan kerugian Bank BPD Jateng, maka menunjukkan bahwa Bank BPD Jawa Tengah pada tahun 1999 mengalami kerugian akibat kredit macet yang dihapusbukukan sehingga dibentuk PPAP yang sangat tinggi. Tingginya PPAP menunjukkan bahwa aktiva produktif bank dalam kualitas sangat buruk ketika dilakukan *due diligence*. Dengan demikian kerugian pada dua terakhir ini bukan disebabkan oleh tingginya biaya bunga (*cost of fund*), namun disebabkan oleh meningkatnya biaya overhead yang pada gilirannya menyebabkan *cost of money* diatas *base lending rate*. Dengan kata lain pada tahun 1998 dan 1999 telah terjadi negative spread yang disebabkan oleh meningkatnya biaya overhead, bukan biaya dana.

Tabel 33. Komposisi Biaya Bank BPD Jateng Tahun 1997, 1998 dan 1999

Keterangan	Komposisi 1997		Komposisi 1998		Komposisi 1999		Perkembang.	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	1998	1999
1. Beban Bunga	212.933.124	67,38	314.097.866	54,79	257.704.930	26,29	47,51	-17,55
2. Beban Tenaga Kerja	36.559.204	11,57	30.916.010	5,39	39.008.209	3,98	-15,43	26,17
3. Beban Peny. Akt. Tetap	5.531.672	1,75	6.300.175	1,10	5.612.650	0,57	13,89	-10,91
4. Beban PPAP	14.010.878	4,43	14.953.478	2,61	463.530.441	47,29	6,73	2.999,82
5. Beban Kantor	13.537.280	4,28	12.863.242	2,24	12.526.859	1,29	-4,98	-2,62
6. Beban Pemeliharaan	11.572.331	3,66	13.668.897	2,38	14.164.543	1,45	18,12	3,62
7. Beban Lain-lain	18.390.300	5,82	174.405.906	30,42	172.109.279	17,56	848,30	-22,97
8. Beban Non Operasional	3.469.632	1,10	6.106.573	1,07	976.626	0,10	76,00	-84,00
Jumlah	316.004.421	100	573.312.147	100	980.160.396	100	81,43	70,96

Sumber : Data Primer 1999

Selanjutnya bagaimanakah kinerja faktor rentabilitas?. Untuk keperluan ini maka disajikan rangkuman data laba bersih, aktiva rata-rata, pendapatan operasional dan biaya operasional untuk periode 1997, 1998 dan 1999 sebagai berikut:

Tabel 34. Rangkuman Data laba Bersih, Aktiva Rata-Rata , Pendapatan Operasional Dan Biaya Operasional

Keterangan	1997	1998	1999
1. Laba Bersih Sblm. Pajak	20.900.451	(20.302.682)	(482.156.323)
2. Aktiva Rata-Rata	1.765.171.751	1.725.857.228	1.846.379.656
3. Pend. Operasional	334.369.894	548.720.930	481.413.449
4. Biaya Operasional	280.356.993	567.205.574	795.752.892

Sumber : Data Primer, 1999

Tabel 35. Perhitungan Aktiva Rata-Rata

Keterangan	1997	1998	1999
1. Jumlah Aktiva 1/1	1.791.801.289	1.738.542.213	1.713.172.244
2. Jumlah Aktiva 31 /12	1.738.542.213	1.713.172.244	1.979.507.068
Jumlah	3.530.343.502	3.451.714.457	3.692.759.312
3. Aktiva Rata-Rata	1.765.171.751	1.725.857.228	1.846.379.656

Sumber : Data Primer, 1999

Dengan dasar pada tabel 34, 35 dan perhitungan pada tabel 36 maka dapat dikatakan bahwa Bank BPD Jateng pada tahun 1997 memperoleh laba sebesar Rp 20.900.451.000 dengan tingkat ROA sebesar 1,18%, pada tahun 1998 Bank BPD Jateng mengalami kerugian

Dengan dasar pada tabel 34, 35 dan perhitungan pada tabel 36 maka dapat dikatakan bahwa Bank BPD Jateng pada tahun 1997 memperoleh laba sebesar Rp 20.900.451.000 dengan tingkat ROA sebesar 1,18%, pada tahun 1998 Bank BPD Jateng mengalami kerugian sebesar Rp 20.302.682.000 dengan tingkat ROA sebesar -1,18% dan pada tahun 1999 mengalami kerugian sangat besar yaitu sejumlah Rp 482.156.323.000 dengan ROA sebesar -26,11%. Kerugian pada tahun 1998 dan 1999 tampaknya disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional. Khusus tahun 1999 diakibatkan oleh biaya penyisihan penghapusan Kredit (aktiva Produktif) yang sangat besar (47,16% dari total biaya). Hal ini tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang membengkak menjadi 165,30%. Biaya operasional (biaya overhead) terbesar adalah biaya PPAP.

Tabel 36. Perhitungan Rentabilitas Bank BPD Jawa Tengah Tahun 1997, 1998 1999

Komponen Rentabilitas	1997	1998	1999
1. Return on Assets (ROA):			
a. Laba Bersih Sblm. Pajak	20.900.451	(20.302.682)	(482.156.323)
b. Aktiva Rata-Rata	1.765.171.751	1.725.857.228	1.846.379.656
ROA	1,18%	- 1,18 %	- 26,11%
2. Raslo Biaya Operasional terhadap Pend.Operasional			
a. Pend. Operasional	334.369.894	548.720.930	481.413.449
b. Biaya Operasional	280.356.993	567.205.574	795.752.892
Rasio	83,85 %	103,37%	165,30%

Sumber : Data Primer diolah, 1999

Penilaian kesehatan faktor rentabilitas.

Untuk menilai faktor ini seperti diungkap dimuka yaitu menggunakan dua komponen yaitu komponen rasio laba terhadap rata-rata volume usaha dan komponen rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha sebesar 0% diberi nilai 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0 nilai kreditnya ditambah 1 dengan maksimum 100.
2. Untuk rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 100% atau lebih diberi nilai 0 dan untuk setiap penurunan 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Tabel 37. Penilaian Kesehatan Faktor Rentabilitas

Keterangan Komponen	1997		1998		1999	
	a	b	a	b	a	b
1. Rasio Rentabilitas	1,18	83,83	-1,18	103,37	-26,11	165,30
2. Nilai $(\text{rasio}/0,015) \cdot (100 - \text{Rasio})/0,08$	78,67	0	0	0	0	0
3. Bobot Komponen Per standar	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4. Bbt Komp. Dlm faktor/ Standar	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5. Nilai Kdt. Komp. (no.2x No.4)	39,34	0	0	0	0	0
6. Bobot faktor Per standar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
7. Nilai Kredit faktor $(\text{No.5a} + 5b) \times \text{No. 6}$	3,93	0	0	0	0	0

Sumber : Data Primer, 1999

Penilaian nilai kredit untuk komponen ROA pada tahun 1997 sebesar 39,34 (cukup sehat), pada tahun 1998 sebesar 0 (tidak sehat) dan pada 1999 sebesar 0 (tidak sehat). Sedangkan nilai kredit untuk komponen rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional pada tahun 1997 sebesar 0 (tidak sehat), pada tahun 1998 sebesar 0 (tidak sehat) dan pada tahun 1999 sebesar 0 (tidak sehat). Kemudian

dari kedua komponen tersebut dapat untuk menentukan kesehatan faktor rentabilitas yaitu pada tahun 1997 sebesar 3,93 (tidak sehat), pada tahun 1998 sebesar 0 (tidak sehat) dan pada tahun 1999 sebesar 0 (tidak sehat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi rentabilitas secara umum pada tahun 1997, 1998 dan pada tahun 1999 tidak sehat.

4.5. Faktor Likuiditas

Likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam penarikan dana nasabah maupun kesanggupan memenuhi komitmen kredit/penempatan dananya. Dalam mengukur tingkat likuiditas digunakan dua indikator yaitu berupa rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dan rasio penempatan kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Kewajiban bersih Call Money adalah nilai bersih hutang call money dikurangi dengan penempatan (Aktiva) pada Call Money. Sementara yang dimaksud Aktiva lancar adalah meliputi kas, Giro BI, SBI, dan SBPU yang telah diendos oleh bank lain.

Indikator Kewajiban bersih Call Money ini untuk mengukur likuiditas jangka waktu yang relatif pendek. Hal ini tercermin dari variabel yang digunakan berupa pasiva maupun aktiva jangka pendek. Semakin besar rasio ini akan menunjukkan likuiditas sebuah bank dalam kondisi semakin ketat dan semakin kecil rasio ini akan menunjukkan

kondisi likuiditas sebuah bank semakin likuid/ekstra likuid. Maksudnya semakin besar aktiva lancar yang dikuasai dibandingkan pasiva Lancar (berupa Call Money) berarti dengan pendekatan likuiditas aktiva, bank akan semakin mampu memenuhi kewajiban pembayaran call money yang jatuh tempo. Hal sebaliknya akan terjadi bila kewajiban bersih Call Money lebih besar daripada aktiva lancarnya.

Untuk kepentingan analisis berikut ini disajikan data sebagai berikut:

Tabel 38. Kewajiban Bersih Call Money Dan Aktiva Lancar

Keterangan	1997	1998	1999
1. Call Money:			
a. Call Money diterima	41.379.924	75.583.922	20.403.592
b. Call Money ditempatkan	14.194.114	13.700.037	7.331.961
2. Kewajiban Bersih Call Money	27.185.810	56.883.885	13.071.631
3. Aktiva lancar:			
a. Kas	50.986.426	99.230.267	221.697.272
b. Giro BI	83.815.906	118.516.638	350.374.245
c. SBI	12.204.200	15.234.073	249.422.000
d. SBPU	11.120.214	18.148.900	140.000.000
4. Jumlah Aktiva Lancar	158.226.746	251.129.878	961.493.517

Sumber : Data Primer, 1999

Tabel 39. Jumlah Kredit Yang Diberikan Dan Dana Yang Diterima (dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	1997	1998	1999
A. Kredit Yang diberikan	1.219.045.004	1.075.673.583	635.889.191
B. Dana Yang Diterima :			
1. BLBI	18.883.217	28.425.288	26.587.633
2. Giro	376.525.924	416.110.591	677.577.844
2. Tabungan	345.300.568	259.001.232	436.137.381
4. Deposito	339.461.894	474.836.448	405.230.126
5. Kas Daerah	117.453.441	97.709.930	105.547.500
5. Pinjaman yang diterima	161.560.953	173.319.572	214.198.008
6. Surat Berharga Diterbitkan	237.000.000	100.000.000	0
7. Modal Inti	90.676.590	63.669.350	79.175.081
8. Modal Pinjaman		0	0
C. Total Dana Yang Diterima	1.686.862.587	1.612.742.412	1.944.453.573

Sumber : Data Primer, 1999

Dalam menentukan dana yang diterima khususnya modal inti, untuk kepentingan pengukuran Loan To Deposit Ratio ini adalah seperti tampak pada tabel 40.

Tabel 40. Perhitungan Modal Inti (dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	1997	1998	1999
1. Modal Disetor	56.667.000	58.664.000	583.754.000
2. Agio Saham			
3. Modal Sumbangan	224.920	224.920	0
4. Cadangan Umum	1.710.006	2.209.176	0
5. Cadangan Tujuan	1.140.004	1.472.784	0
6. Laba Ditahan Setelah pajak	14.727.843	12.672.744	0
7. Laba-tahun-Tahun Lalu Setelah Pajak	11.760.040	14.727.843	0
8. Rugi Tahun lalu (-/-)			(20.302.682)
9. Laba tahun Berjalan Setelah Pajak (50%)	7.363.922	0	0
10. Rugi Tahun Berjalan -/-		(20.302.682)	(482.156.323)
11. Sub Total			
12. Goodwill (-/-)			0
13. Kekurangan Jumlah PPAP			
dari PPAPWD -/-	(2.917.145)	(5.999.435)	(2.119.914)
14. Jumlah Modal Inti yang Diperhitungkan	90.676.590	63.669350	79.175.081

Sumber : Data Primer , 1999

Tabel 41. Kekurangan Jumlah PPAPD dari PPAPWD (dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	1997	1998	1999
PPAPWD	24.566.408	29.102.244	73.224.440
PPAPD	21.649.263	23.102.809	71.124.726
Kekurangan	2.917.145	5.999.435	2.119.914

Sumber : Data Primer, 1999

Tabel 42. Perhitungan Indikator Likuiditas bank 1997-1999

Keterangan	1997	1998	1999
1. Kewajiban Bersih Call Money	27.135.810	56.883.885	13.071.831
2. Jumlah Aktiva Lancar	158.226.748	251.129.878	961.493.517
3. Kredit Yang diberikan	1.219.045.004	1.075.673.583	635.889.191
4. Dana Yang Diterima	1.686.862.587	1.612.742.412	1.944.453.573
5. Indikator Likuiditas Bank			
a. Rasio Kewajiban Bersih Call Money Terhadap Aktiva lancar	17,18%	22,65%	1,36%
b. Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Yang Diterima	72,27%	66,70%	32,70%

Sumber : Data Primer, 1999

Kondisi likuiditas jangka pendek pada tahun 1997 sebesar 17,18% dan kemudian mengetat pada tahun 1998 menjadi 22,65%, sementara pada tahun 1999 kondisinya sangat likuid yang tercermin dari penurunan rasio kewajiban bersih Call Money menjadi 1,36%. Disamping itu untuk komponen LDR pada tahun 1997 masih bagus, kemudian pada tahun 1998 juga masih likuid sementara pada tahun 1999 tampaknya semakin over likuid. Apakah kondisi ini masih dapat ditoleransi, sebab kondisi yang terlalu likuid juga kurang bagus sebaliknya terlalu ketat juga tidak bagus untuk pengelolaan likuiditas bank. Untuk itu perlu dinilai kondisinya.

Penilaian kesehatan faktor likuiditas dapat dilakukan terhadap rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar dan komponen rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (loan To Deposit ratio/LDR). Penilaian tersebut didasarkan sebagai berikut:

- a. Rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva lancar sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Rasio Kredit yang Diberikan Terhadap dana Yang diterima sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 1% mulai dari 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

Dengan mendasarkan perhitungan rasio rentabilitas di atas dan ketentuan tersebut maka kita dapat menentukan kesehatan faktor likuiditas di Bank BPD jateng sebagai berikut:

Tabel 43. Penilaian Kesehatan Faktor Likuiditas

Keterangan Komponen	1997		1998		1999	
	a	B	a	b	a	b
1. Rasio Likuiditas	17,18	72,27	22,65	66,70	1,36	32,70
2. Nilai $(99 - \text{Rasio } a) \times (114 - \text{Rasio } b) \times 4$	81,82	100	76,35	100	97,64	100
3. Bobot Komponen Per standar	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4. Bbt Komp. Dlm faktor/ Standar	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5. Nilai Kdt. Komp. $(\text{no. } 2 \times \text{No. } 4)$	40,91	50	38,18	50	48,82	50
6. Bobot faktor Per standar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
7. Nilai Kredit Faktor $(\text{no. } 5a + 5b) \times \text{No. } 6$	9,09		3,82		9,88	

Sumber : Data Primer diolah, 1999

Berdasarkan penilaian bahwa nilai kredit komponen untuk rasio kewajiban bersih call Money pada tahun 1997 adalah 40,91 (sehat), pada tahun 1998 sebesar 38,18 (cukup Sehat) dan pada tahun 1999 sebesar 48,82 (sehat). Sedangkan penilaian untuk kompoenn LDR pada tahun 1997 hingga 1999 menempati predikat sehat. Dengan

mengalikan dari penjumlahan nilai kredit komponen dengan bobot faktor likuiditas (10%) maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1997 faktor ini memiliki nilai kredit sebesar 9,09 (sehat), pada tahun 1998 sebesar 8,82 (sehat) dan pada tahun 1999 sebesar 9,88 (sehat).

4.6. Penilaian Faktor BMPK Dan Faktor Judgement

Penilaian kelima faktor diatas harus dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi penilaian yaitu Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Faktor Judgement. Kedua hal tersebut bisa mengurangi nilai kredit kesehatan bank bila terjadi pelanggaran.

Penting untuk diingat bahwa Batas maksimum Pemberian Kredit (legal lending limit) bukan merupakan pembatasan pemberian kredit dalam arti volume kredit bank, namun lebih bersifat batas untuk mengatur penyebaran kredit. Tujuannya adalah untuk penyebaran risiko sehingga diharapkan bank akan menuai risiko yang minimum dari portofolio kreditnya. Sementara untuk faktor judgement lebih bersifat etis.

Tabel 44. Daftar Pelanggaran BMPK Tahun 1997 (dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Kredit	Sekuritas	Penyertaan	Lainnya	Jumlah	Pelampauan (Rp)	Pelampauan (%)
A. Pihak Terkait Dengan Bank (10%)							
1. Direksi/Pegawai							
2. Komisaris Bukan pemegang Saham							
3. Pemegang Saham							
4. Keluarga:							
a. Direksi							
b. Komisaris							
c. Pemegang saham							
5. Pejabat bank lainnya							
6. Perusahaan yang Terkait dengan no 1 s/d 5							
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Pihak /Kelompok Pemegang Yang tidak Terkait dengan bank (20%)							
a. Individual Pemegang							
b. Kelompok Pemegang							
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data Primer, 1999

Tabel 45. Daftar Pelanggaran BMPK Tahun 1998 (Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Kredit	Sekuritas	Penyertaan	Lainnya	Jumlah	Pelampauan (Rp)	Pelampauan (%)
A. Pihak Terkait Dengan Bank (10%)							
1. Direksi/Pegawai							
2. Komisaris Bukan pemegang Saham							
3. Pemegang Saham							
4. Keluarga:							
a. Direksi							
b. Komisaris							
c. Pemegang saham							
5. Pejabat bank lainnya							
6. Perusahaan yang Terkait dengan no 1 s/d 5							
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Pihak /Kelompok Pemegang Yang tidak Terkait dengan bank (20%)							
a. Individual Pemegang							
b. Kelompok Pemegang							
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data Primer, 1999

Tabel 46. Daftar Pelanggaran BMPK Tahun 1999 (Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Kredit	Sekuritas	Penyeritaan	Lainnya	Jumlah	Pelam- pauan (Rp.)	Pelam- pauan (%)
A. Pihak Terkait Dengan							
Bank (10%)							
1. Direksi/Pegawai							
2. Komisaris Bukan peme- gang Saham							
3. Pemegang Saham							
4. Keluarga							
a. Direksi							
b. Komisaris							
c. Pemegang saham							
5. Pejabat bank lainnya							
6. Perusahaan yang Ter- kait dengan no 1 s/d 5							
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Pihak /Kelompok							
Peminjam Yang tidak							
Terkait dengan bank (20%)							
a. Individual Peminjam							
b. Kelompok Peminjam							
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data Primer, 1999

Tabel 47. Daftar Penilaian Faktor Judgement

Keterangan	1997	1998	1999
1. Perselisihan Intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan :	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank, termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3. Window Dressing dalam pembukuan atau laporan bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4. Praktek Bank dalam Bank atau melakukan usaha bank diluar pembukuan bank.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Data Primer, 1999

Dalam tiga tahun terakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK, baik bagi pihak terkait maupun dengan pihak yang tak terkait dengan Bank BPD Jawa Tengah. Bank selalu mengatur portofolio kreditnya tanpa mengorbankan ketaatan bank terhadap otoritas moneter. Dengan demikian faktor ini tidak mengurangi penilaian kesehatan bank.

Sementara itu dalam hal faktor judgement, bank juga tidak melakukannya seperti tercantum dalam tabel 45. Pada faktor window dressing yang dapat mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank terutama pada keadaan keuangannya, berdasarkan penelitian neraca bank yang dimiliki adalah sama dengan neraca yang dipublikasikan dan yang diberikan pada Bank Indonesia sebagai laporan bank. Dengan demikian neraca bank sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian juga untuk praktek bank dalam bank, perselisihan intern yang dapat menimbulkan kesulitan bank serta campur tangan pihak luar selama tiga tahun terakhir tidak ditemukan. Oleh karena itu faktor judgement ini tidak mengurangi penilaian kesehatan bank terhadap faktor CAMEL.

4.7. Penilaian Menyeluruh Tingkat Kesehatan Bank BPD Jawa Tengah.

Dengan melakukan penilaian terhadap masing-masing faktor dan ketentuan lainnya maka dapat ditentukan Tingkat Kesehatan Bank BPD Jawa Tengah per 31 Desember 1997, Per 31 Desember 1998 dan Per 31 Desember 1999. seperti tampak pada tabel 46.

Tabel 48. Hasil Penilaian Kesehatan Bank BPD Jawa Tengah 1997, 1998 & 1999

Faktor Dinilai	Nilai Kredit	Predikat	Nilai Kredit	Predikat	Nilai Kredit	Predikat
1. Capital	25,00	Sehat	25,00	Sehat	25,00	Sehat
2. Assets Quality	20,93	Cukup Sehat	13,18	Tidak Sehat	25,54	Sehat
3. Management	22,75	Sehat	22,75	Sehat	23,75	Sehat
4. Earning Power	3,93	Tidak Sehat	0	Tidak Sehat	0	Tidak Sehat
5. Liquidity	9,09	Sehat	8,82	Sehat	9,88	Sehat
6. Legal Lending Limit.	0		0		0	
7. Judgement Factors	0		0		0	
Total Nilai Kredit	81,70	Sehat	69,75	Cukup Sehat	84,17	Cukup Sehat

Sumber : Data Primer diolah, 1999

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Bank BPD Jawa Tengah pada tahun 1997 dalam kondisi sehat dengan total nilai kredit 81,45 walaupun kondisi rentabilitas tidak sehat sebagai akibat perolehan laba yang relatif kecil. Laba yang kecil disebabkan oleh faktor overhead cost yang banyak didominasi oleh PPAP sebagai wujud kualitas aktiva yang belum sehat (masih dalam kategori cukup sehat). Pada tahun 1998 Bank BPD Jateng sangat memprihatinkan akibat negative spread dan yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai ROA sebesar - 1,18%. Kondisi rentabilitas ini jelas tidak sehat, namun faktor modal, manajemen dan likuiditas dalam kondisi sehat. Kondisi Kualitas assets adalah tidak sehat dan ini menjelma menjadi meningkatnya PPAP (overhead cost) yang pada gilirannya menimbulkan/mengindikasikan negative spread walaupun relatif kecil. Hasil akhir penilaian kesehatan pada tahun 1998

adalah cukup sehat dengan nilai sangat minimal (mendekati kurang sehat) yaitu 69,75.

Pada tahun 1999 kondisi Bank BPD Jateng sebenarnya cukup mengesankan setelah awal (april 1999) dilakukan due diligence dan menunjukkan CAR sebesar -28,5 dan terjadi ekrugian kredit akibat memburuknya kolektibilitas (kualitas aktiva Produktif), namun pada tahun 1999 juga dilakukan rekapitalisasi perbankan pada tahun itu juga, maka operasi bank pada tahun 1999 menjadi cukup sehat walaupun belum mampu mencapai laba (masih rugi). Program rekapitalisasi telah meningkatkan kualitas aktiva dari kurang sehat pada tahun 1998 menjadi sehat pada tahun 1999 dan juga telah mampu menjaga kondisi likuiditas yang berlebihan dan kondisi likuiditas yang berlebihan sebenarnya merugikan kepentingan rentabilitas. Oleh karena itu faktor rentabilitas yang tidak sehat disamping disebabkan oleh besarnya overhead cost adalah faktor likuiditas yang relatif over liquid. Namun demikian kondisi umum pada tahun 1999 adalah sehat dengan nilai kredit 84,17.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Rekapitalisasi Perbankan di bank BPD Jawa Tengah telah berlangsung sejak Maret 1999 dan dinyatakan selesai. Hasil due diligence menunjukkan bahwa kondisi CAR pada awal maret 1999 sebesar -28,5% (bernilai kredit 0 atau tidak sehat). Pasca Rekapitalisasi kondisi CAR BPD Jateng pada tahun 1999 sebesar 15,33%, sebelumnya pada tahun 1997 sebesar 10,40%, pada tahun 1998 sebesar 9,67%. Menurunnya CAR pada tahun 1998 disebabkan pertumbuhan modal intern minus 45,97% dan pada tahun 1999 sebesar minus 585,972%. Pertumbuhan modal intern yang minus menyebabkan meningkatnya capital gap pada tahun 1998 sebesar 21.957.348.000 dan pada tahun 1999 sebesar 453.824.152.000. Capital gap pada tahun 1999 ditutup dengan program rekapitalisasi sebesar 525.090.000.000 yang terdiri dari setoran modal Pemda I sebesar Rp 85.167.000.000, Pemda II se Jateng sebesar Rp 50.501.000.000 dan Pemerintah Pusat sebesar Rp 389.422.000.000. Dengan demikian pada tahun 1999 telah terjadi perubahan struktur modal dan telah mampu menutup

capital gap.(bahkan melebihi). Dengan demikian secara umum kondisi permodalan adalah sehat.

5.1.2 Kualitas Aktiva pada tahun 1997 adalah bernilai kredit sebesar 20,93 (cukup sehat), pada tahun 1998 sebesar 13,18 (tidak sehat) dan pada tahun 1999 sebesar 25,54% (sehat). Kondisi tahun 1997 adalah sehat, kondisi tahun 1998 yang menurun menjadi kondisi tidak sehat. hal ini disebabkan oleh memburuknya kolektibilitas aktiva produktif. Khusus pada tahun 1999 kondisi kualitas yang sehat sebagai akibat adanya penghapusbukuan kredit bermasalah sehingga yang tampak dalam neraca bahwa kredit/aktiva produktif setelah adanya penghapusbukuan. Dengan demikian ketika penilaian dilakukan pada akhir tahun, kondisinya menjadi sehat. Kerugian akibat penghapusbukuan aktiva produktif tercermin dari meningkatnya biaya PPAP yang menimbulkan kerugian sangat besar pada tahun 1999 dan ditutup dengan program rekapitalisasi. Dengan demikian program rekapitalisasi telah menyehatkan kualitas assets bank BPD Jawa Tengah pada tahun 1999

5.1.3. Kondisi Manajemen umum maupun manajemen risiko secara umum adalah dalam kondisi sehat. Kondisi ini tidak lepas dari konsistensi manajemen BPD Jateng untuk tetap bekerja dengan prinsip prudential banking. Bank BPD Jateng selalu berusaha

memenuhi tuntutan akan manajemen yang sehat dengan mengimbangi setiap faktor yang dinilai pada faktor manajemen.

5.1.4. Kondisi earning power adalah kondisi yang sangat mengesankan bagi Bank BPD Jateng. Selama tiga tahun terakhir belum mampu memperoleh laba yang diinginkan. Pada tahun 1997 ROA relatif kecil yaitu 1.16% sementara pada tahun 1998 dan 1999 memiliki ROA yang minus atau rugi. Hasil penilaian faktor ini adalah selama tiga tahun earning power tidak sehat.

Kondisi yang tidak sehat ini sebagian besar pada tahun 1998 disebabkan oleh negative spread. Negatif spread ini disebabkan oleh cost of money yang lebih tinggi dari pada base lending rate. Cost of Money tinggi karena overhead cost relatif tinggi. Hal demikian juga terjadi pada tahun 1999. Kerugian terbesar akibat kualitas aktiva produktif yang tidak sehat pada tahun 1998. Kondisi ini menyebabkan biaya overhead meningkat tajam yang selanjutnya meningkatkan cost of money diatas base lending rate. Disamping Cost of maney yang tinggi, Bank BPD Jateng terlalu likuid, terdapat idle cash yang relatif besar sehingga mengurangi kesempatan untuk memperoleh laba pada tahun yang bersangkutan.

5.1.5 Faktor Likuiditas adalah faktor yang selalu sehat. Sebab selama tiga tahun nilai kredit faktor ini masing-masing pada tahun 1997 sebesar 9.09 ;pada tahun 1998 sebesar 8,82 dan pada tahun

1999 sebesar 9,88. Kondisi likuiditas sehat selalu namun kondisi ini terlalu mengorbankan kepentingan rentabilitas. Bank BPD terlalu konservatif dalam mengelola likuiditas bank. Sehingga likuiditas sehat tapi kepentingan rentabilitas tampak kurang diperhatikan.

5.1.6. Secara umum tingkat kesehatan Bank BPD Jawa Tengah pada tahun 1997 adalah sehat, pada tahun 1998 adalah cukup sehat dan pada tahun 1999 adalah juga cukup sehat. Tingkat kesehatan tersebut berkat dominasi faktor permodalan yang sehat yang berimbas pada kesehatan kualitas aktiva, likuiditas dan manajemen pada umumnya. Program rekapitalisasi belum mampu mempengaruhi perolehan laba atau belum mampu menyehatkan rentabilitas bank karena dana rekap sebagian besar untuk membiayai likuiditas dan untuk menutup kerugian saja (belum ditempatkan ke aktiva produktif).

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa secara implisit bank telah mampu memelihara kesehatan bank melalui program rekapitalisasi. Namun belum mampu meningkatkan laba bank karena dana masih terkonsentrasi pada kepentingan likuiditas dan menutup kerugian. Oleh karena itu implikasinya adalah Bank BPD

Jawa Tengah harus segera menggeser portofolio dananya dari dana likuid ke dana yang produktif untuk memperoleh laba dimasa yang akan datang, misalnya melalui penempatan kredit dan surat berharga jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, Pembelanjaan Perusahaan, BPFE UGM, Yogyakarta, 1994
- Benton Gup, Donald R Fraser & James W Kolari, Commercial Bank Management, John Wiley & Son, New York, 1989
- Duanne B Graddy & Austin H Spencer, Managing Commercial Bank, Prentice Hall International, New York, 1990
- Frank P Johnson & Ricard D Johnson, Commercial Bank Management, The Dryden Press, New York 1984
- Fred C Yeager & Neil E Seitz, Financial Institution Management, A Prentice Hall Company, Virginia, 1982.
- George F Hempel, Donald G Simonson & Alan B Coleman, Bank Management, John Willey & Son, New York, 1994
- Joseph Sinkey, Commercial Bank Financial Management, John Wiley & Son, New York, 1988.
- Ketentuan 27 April 1998 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, BI, Jakarta 1997
- Robert O Emiser, Financial Institution, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1980.
- Saeful Hasan, Bidang Konsentrasi Investasi Dan Perbankan, Manajemen Bank, Program Magister Manajemen UGM, Yogyakarta, 1990
- SK Dir. BI No 30 / 267 / KEP / DIR Tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- SK Dir. BI No 30 / 268 / KEP / DIR Tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
- SK Dir. BI No 31 / 267 / KEP / DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio, UPP AMP, YKPN, Yogyakarta, 1998
- Taswan, Manajemen Dana Bank, Pusat Penerbitan STIE Stikubank, Semarang, 2000

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Wasis, Drs., Pengantar Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi UKSW,
Salatiga, 1983.

William F Sharpe, Gordon J Alexander & Jeffrey V Bailey, Investment, Prentice
Hall Inc., New Jersey, 1995

....., Paket Deregulasi Perbankan, 29 Mei 1993, Mini Jaya Abadi, 1993